



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana dapat menyelesaikan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Jemberana Tahun 2024. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, yang mengamanatkan Bupati/Walikota menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Kabupaten/Kota.

Profil Perkembangan Kependudukan yang berisikan gambaran secara umum tentang kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Jemberana yang bersumber dari data pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikonsolidasikan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat Semester 2 Tahun 2024 yang mana wajib digunakan sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013. Selain itu juga data yang digunakan adalah dari lintas sektor lain yang menangani bidang anggaran dan belanja daerah, statistik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial.

Demikianlah, diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pendukung kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Jemberana. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Kompilasi Administrasi Data Kependudukan Kabupaten Jemberana Tahun 2025. Saran dan kritik sangat kami perlukan dari berbagai pihak demi perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Jemberana, 04 April 2025
a/n Bupati Jemberana,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana



I Wayan Sudana, S.Sos
NIP. 19650705 198602 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan	2
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA	5
2.1 Letak Geografis	5
2.2 Kondisi Demografis	6
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah	7
2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	7
2.3.1.1 Pendapatan Daerah	8
2.3.1.2 Belanja Daerah	8
2.3.1.3 Pembiayaan Daerah	9
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.4 Potensi Daerah	11
2.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah	12
2.4.2 Perkembangan Investasi di Kabupaten Jemberana	12
BAB III SUMBER DATA	14
BAB IV KUANTITAS PENDUDUK	15
4.1 Jumlah Penduduk	15
4.1.1 Kepadatan Penduduk	15
4.1.2 Pertumbuhan Penduduk	16
4.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	17
4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	17
4.2.2 Rasio Jenis Kelamin	20
4.2.3 Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	21
4.3 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	23
4.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	23
4.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama	24
4.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	25



4.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan	27
4.4 Keluarga	29
4.4.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	29
4.4.2 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	30
4.4.3 Karakteristik Kepala Keluarga	31
BAB V KUALITAS PENDUDUK	41
5.1 Kesehatan	41
5.1.1 Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio/CWR</i>)	41
5.1.2 Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/CBR</i>)	41
5.1.3 Angka Kematian Bayi (AKB)	42
5.1.4 Angka Kematian Balita (AKABA)	42
5.1.5 Angka Kematian Ibu (AKI)	42
5.2 Pendidikan	43
5.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	43
5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	44
5.3 Ekonomi	44
5.3.1 Angkatan Kerja Menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	44
5.3.2 Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)	49
5.4 Sosial	51
5.4.1 Jumlah Pekerja Anak	51
5.4.2 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	51
BAB VI MOBILITAS PENDUDUK	53
6.1 Migrasi Keluar (Pindah)	53
6.2 Migrasi Masuk (Pindah Datang)	54
BAB VII KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	55
7.1 Kepemilikan Kartu Keluarga	55
7.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	56
7.3 Kepemilikan Akta-Akta Catatan Sipil	57
7.3.1 Akta Kelahiran	57
7.3.2 Akta Perkawinan	57
7.3.3 Akta Perceraian	58
7.3.4 Akta Kematian	59
BAB VIII KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Jemberana	5
Tabel 2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2024	9
Tabel 3.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jemberana (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024	9
Tabel 4.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jemberana (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024	10
Tabel 5.	Perkembangan PDRB Kabupaten Jemberana Tahun 2020-2024	11
Tabel 6.	Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Jemberana Tahun 2020-2023	13
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jemberana Tahun 2024	15
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jemberana Tahun 2024	16
Tabel 9.	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jemberana Tahun 2024	17
Tabel 10.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jemberana Tahun 2024	18
Tabel 11.	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>), Kabupaten Jemberana Tahun 2024	20
Tabel 12.	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2024	21
Tabel 13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Jemberana Menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua, Tahun 2024	21
Tabel 14.	Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan, Tahun 2024	22
Tabel 15.	Rasio Ketergantungan Berdasarkan Jenis Kelamin, Kabupaten Jemberana Tahun 2024	22
Tabel 16.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	23
Tabel 17.	Penduduk Menurut Agama, Kabupaten Jemberana 2024	24
Tabel 18.	Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Tahun 2024	25
Tabel 19.	Penduduk Kabupaten Jemberana Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Status Kawin, Tahun 2024	26
Tabel 20.	Jumlah Penduduk Kabupaten Jemberana Menurut Jenis Disabilitas dan Kecamatan, Tahun 2024	28
Tabel 21.	Jumlah Penyandang Cacat Kabupaten Jemberana Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin, Tahun 2024	28
Tabel 22.	Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Jemberana, Tahun 2024	29



Tabel 23.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	30
Tabel 24.	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024	31
Tabel 25.	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024	32
Tabel 26.	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024	32
Tabel 27a.	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024	33
Tabel 27b.	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Perempuan, dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024	34
Tabel 28.	Distribusi Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Jember Tahun 2024	35
Tabel 29.	Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024	37
Tabel 30.	Distribusi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024	37
Tabel 31.	Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio/CWR</i>)	41
Tabel 32.	Angka Kelahiran Kasar Berdasarkan Kecamatan, Kab Jember Tahun 2024	42
Tabel 33.	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember Tahun 2018-2024	42
Tabel 34.	Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2018-2024	43
Tabel 35.	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2018-2024	43
Tabel 36.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jember Tahun 2017-2022	44
Tabel 37.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jember Tahun 2017-2022	44
Tabel 38.	Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kabupaten Jember Tahun 2024	45
Tabel 39.	Angka Penyerapan Kerja (<i>Employment Rate</i>) Kab. Jember Tahun 2024	45
Tabel 40.	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024	46
Tabel 41.	Distribusi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024	46
Tabel 42.	Jumlah Pencari Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, dan Angka Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024	50
Tabel 43.	Distribusi Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Jember Tahun 2024	50
Tabel 44.	Jumlah Penduduk Umur 10-14 Tahun, Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2024	51



Tabel 45.	Angka Penyandang Cacat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024	51
Tabel 46.	Migrasi Keluar (Pindah) Menurut Kecamatan di Kab. Jember Tahun 2024	53
Tabel 47.	Migrasi Masuk (Datang) Menurut Kecamatan di Kab. Jember Tahun 2024	54
Tabel 48.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2024	55
Tabel 49.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el di Kab. Jember Tahun 2024	56
Tabel 50.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan di Kab. Jember Tahun 2024	57
Tabel 51.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2024	58
Tabel 52.	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Jember Tahun 2024	59
Tabel 53.	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Jember Sampai Tahun 2024	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Jembrana	6
Gambar 2.	Piramida Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perjalanan suatu bangsa guna mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang sejahtera. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang utama dalam pembangunan sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Jember guna memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Jember.

1.2. Tujuan

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2024 bertujuan untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan informasi mengenai perkembangan kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2024. Secara umum, Profil Perkembangan Kependudukan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan dan perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah. Sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2024 digunakan sebagai rujukan data untuk:

- 1.1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.
- 1.2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah.
- 1.3. Penentuan target kinerja dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
- 1.4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial.
- 1.5. Pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 disusun berskala Kabupaten dengan batasan wilayah Kabupaten Jember yang memiliki 5 Kecamatan dengan



jumlah 51 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jember berdasarkan data registrasi yang diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat Semester 2 Tahun 2024 yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan data yang diperoleh dari sektor lain yang terkait seperti data dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variable kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan variable mobilitas penduduk.

1.4. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan.

- **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).
- **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).
- **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).
- **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).
- **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,



pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).

- **Kematian atau mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik).
- **Ratio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
- **Mobilitas penduduk permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
- **Mobilitas penduduk non permanen (circucaltion/sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik /pulang pergi (*commuting*) dan menginap/mondok.
- **Penduduk musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.
- **Mobilitas penduduk ulang-alik atau pulang pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
- **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spesial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembagalembagasosial, maupun perilaku masyarakatnya.
- **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
- **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja.
- **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
- **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitaspada saat TFR dihitung.
- **Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 butan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.



- **Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
- **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk.
- **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta Latin dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar.
- **Buta Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengataman dasar.
- **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun.
- **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
- **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

2.1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Kabupaten Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, pulau NTB dan pulau NTT melalui jalur darat.

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terletak membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ}03'40''$ – $8^{\circ}50'48''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $114^{\circ}42'40''$ BT. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Selat Bali

Luas wilayah Kabupaten Jembrana 84.180 Ha ($841,80 \text{ Km}^2$) atau 14,93 persen dari luas wilayah Pulau Bali, yang terbagi ke dalam lima kecamatan. Wilayah Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Mendoyo dengan luas wilayah $294,49 \text{ Km}^2$ atau 34,98 persen dari luas wilayah Kabupaten Jembrana dan wilayah Kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Jembrana dengan luas wilayah $93,97 \text{ Km}^2$ atau 11,16 persen dari wilayah Kabupaten Jembrana. Berikut merupakan tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana:

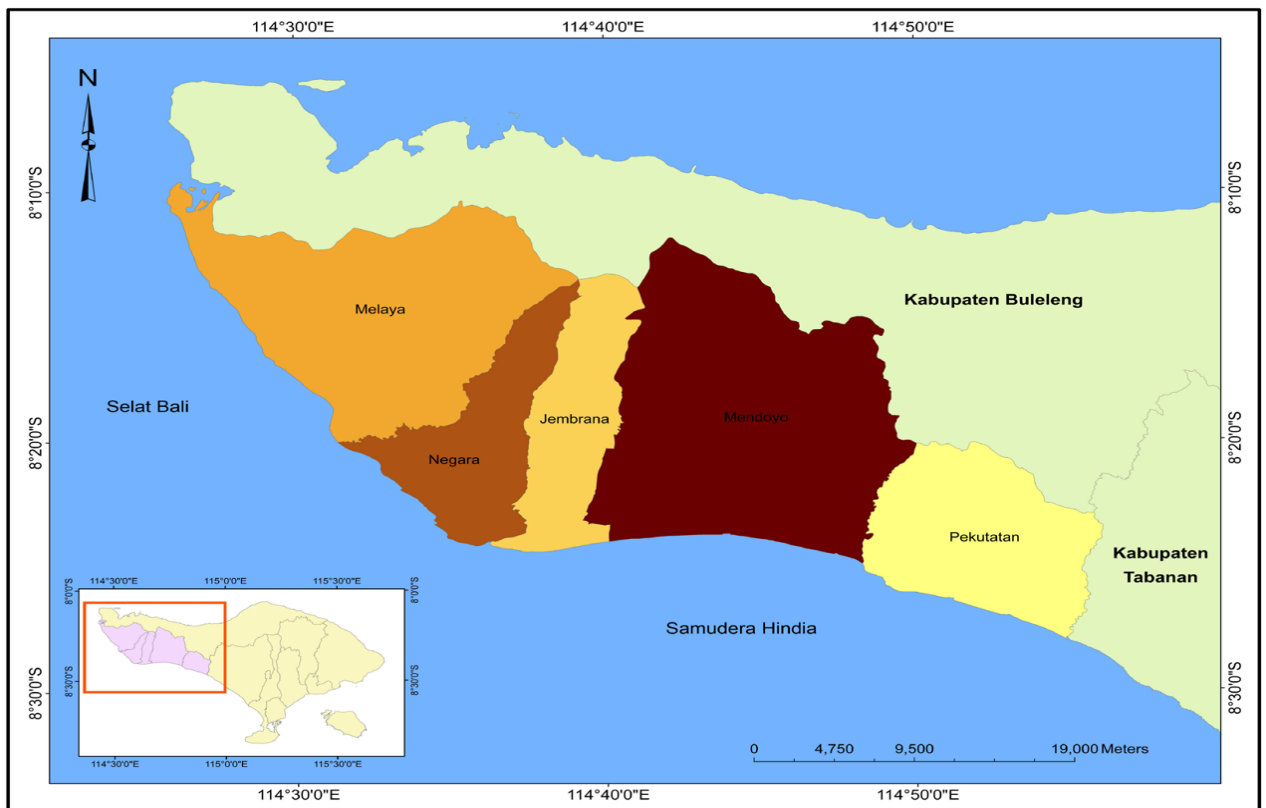
Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Jembrana

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	PERSENTASE
1	51.01.01	NEGARA	12	12.650	15,03
2	51.01.02	MENDOYO	11	29.449	34,98
3	51.01.03	PEKUTATAN	8	12.965	15,40
4	51.01.04	MELAYA	10	19.719	23,42
5	51.01.05	JEMBRANA	10	9.397	11,16
TOTAL			51	84.180	100,00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Jembrana



Gambar 1. Peta Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jemberana



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Jemberana

2.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Jemberana pada tahun 2024 adalah 330.221 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 165.808 jiwa dan perempuan 164.413 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Jemberana sejumlah 100,85 persen, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki hampir sama dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Jika dikaitkan dengan kelompok umur, tampak bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar pada kelompok umur muda dan kelompok umur produktif (usia 30 tahun kebawah). Sedangkan perempuan, yang lebih besar berada pada kelompok umur tua (55 tahun keatas). Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Negara yaitu sebesar 100.451 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Pekutatan yaitu sebesar 31.123 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jemberana termasuk sedang, yaitu mencapai 392 jiwa/km². Tetapi apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kabupaten Jemberana akan semakin bertambah padat seperti Kabupaten lainnya.



2.3. Gambaran Ekonomi Daerah

Salah satu implikasi adanya otonomi daerah adalah daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun dari sisi pembiayaan pembangunan. Salah satu aspek pembangunan yang mendasar dan strategis adalah pembangunan aspek ekonomi, baik pembangunan ekonomi pada tatanan mikro maupun makro.

Perkembangan kondisi umum perekonomian merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pengelolaan ekonomi secara efisien dan efektif.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara mikro, pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pembangunan individu, kelompok maupun golongan. Akan tetapi pembangunan ekonomi makro sebagaimana di Kabupaten Jemberana didasarkan pada beberapa penekanan seperti pencapaian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan investasi. Sebagai komponen ekonomi makro, maka keberadaan PDRB, APBD, PAD, dan investasi seringkali menjadi komoditas politik. Kendatipun hal tersebut di Kabupaten Jemberana masih berkembang dalam batas-batas normatif.

2.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan APBD, seluruh pendapatan daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.



2.3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, sumber pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

2.3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan atau urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, yang dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Belanja Kabupaten Jember dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.



2.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah, serta antara Anggaran Pendapatan Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran.

Berikut adalah tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jemberana tahun anggaran 2024.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Daerah	1.275.558.564.202,00
Belanja Daerah	1.344.311.166.692,00
Pembiayaan Daerah	68.752.602.490,00

Sumber: Perda APBD Jemberana Tahun 2024

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai variabel. PDRB dapat dilihat dari dua sisi yaitu PDRB atas dasar harga konstan yang perhitungannya dari jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun dan dikalikan dengan harga tahun dasar. Dari sisi lain, besarnya PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat setiap tahun dikalikan dengan perubahan harga setiap tahun.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa PDRB merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi makro. Dalam kaitan dengan hal tersebut, berikut ini disajikan perkembangan PDRB Kabupaten Jemberana atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2022-2024 seperti tabel berikut ini.

Tabel 3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jemberana (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jemberana (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189,29	3.381,63	3.815,64



Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	123,08	130,30	134,83
C. Industri Pengolahan	775,28	826,38	888,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	21,39	23,84	24,22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,09	11,36	11,89
F. Konstruksi	1.560,61	1.590,39	1.623,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.515,98	1.648,40	1.711,99
H. Tranposrtasi dan Pergudangan	1.992,43	2.281,48	2.505,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725,73	1.915,05	2.113,00
J. Informasi dan Komunikasi	920,10	962,91	1.006,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	564,16	642,05	731,78
L. Real Estate	686,32	711,53	724,72
M,N. Jasa Perusahaan	121,41	131,17	142,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	408,83	407,50	426,84
P. Jasa Pendidikan	329,30	326,23	337,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359,63	375,56	386,77
R,S,T, U. Jasa Lainnya	227,61	247,49	259,13
Produk Domestik Regional Bruto	14.532,26	15.613,28	16.845,01
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana			
- Tahun 2023 : Angka sementara			
- Tahun 2024 : Angka sangat sementara			

Sumber: <https://jembranakab.bps.go.id/indicator/52/155/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-jembrana.html>

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.875,69	1.904,21	2.076,37
B. Pertambangan dan Penggalian	76,86	78,74	78,82
C. Industri Pengolahan	485,45	498,83	518,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,80	12,84	13,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,46	8,45	8,72
F. Konstruksi	972,18	974,30	985,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	992,32	1.043,01	1.066,39
H. Tranposrtasi dan Pergudangan	1.189,90	1.297,38	1.378,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.019,15	1.082,60	1.156,60
J. Informasi dan Komunikasi	765,21	788,76	811,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	316,43	350,49	393,42



Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
L. Real Estate	503,94	507,42	508,22
M,N. Jasa Perusahaan	74,83	78,25	83,34
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	266,93	258,70	270,16
P. Jasa Pendidikan	220,30	216,95	218,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237,84	242,70	245,89
R,S,T, U. Jasa Lainnya	140,37	148,74	153,12
Produk Domestik Regional Bruto	9.157,67	9.492,38	9.965,23
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana			
- Tahun 2023 : Angka sementara			
- Tahun 2024 : Angka sangat sementara			

Sumber: <https://jembranakab.bps.go.id/indicator/52/156/1/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-jembrana.html>

Berdasarkan tabel di atas, bahwa kontribusi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang paling mendominasi terhadap PDRB di Kabupaten Jembrana. Kemudian disusul oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Dari tabel diatas terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB di Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 sampai 2024 pada umumnya mengalami kenaikan di hampir semua sektor ekonomi, yang berarti adanya peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan jumlah produksi pasca dilanda pandemi Covid-19.

Selanjutnya perkembangan PDRB di Kabupaten Jembrana 5 tahun terakhir atas dasar harga konstan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perkembangan PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)
2020	13.437,61	8.951,35
2021	13.510,63	8.892,80
2022	14.532,26	9.157,67
2023*	15.613,28	9.492,38
2024**	16.845,01	9.965,23

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana

Keterangan: * angka sementara

**angka sangat sementara

2.4. Potensi Daerah.

Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jembrana sangat besar, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum seluruhnya tergali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah. Potensi yang sangat menonjol di Kabupaten Jembrana adalah:



2.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Jembrana memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentangan alam memiliki panorama yang eksotik terutama hutan lindung dan budidaya wisata alam dan bahari sebagai daerah daya tarik kunjungan wisatawan.

Pengembangan wilayah tersebut dibagi atas:

1. Potensi Kawasan Lindung, meliputi:
 - a). Potensi kawasan suaka alam dan suaka marga satwa, yang meliputi kawasan suaka alam laut di Kecamatan Melaya dan Kelurahan Gilimanuk yang merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Bali Barat.
 - b). Potensi kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional dan taman wisata alam.
 - c). Potensi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dimana potensi tersebut terletak di Kecamatan Negara, situs Gilimanuk, dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk.
 - d). Potensi kawasan perlindungan bawahan terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi kelas I.
 - e). Potensi kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk, sepadan sungai, pantai, kawasan kota terbuka hijau, dan kawasan suci pura.
2. Potensi kawasan budidaya, yang meliputi:
 - a). Potensi Kawasan Hutan Produksi;
 - b). Potensi Pengembangan Lahan Pertanian;
 - c). Potensi Perikanan;
 - d). Potensi Peternakan;
 - e). Potensi Pengembangan Industri;
 - f). Potensi Pertambangan;
 - g). Potensi Perdagangan;
 - h). Potensi Kawasan Pusat Pemerintahan dan Cagar Budaya.
3. Potensi Kawasan Strategis merupakan kawasan yang menjadi prioritas pengembangan melalui manfaat masyarakat.
4. Potensi Kawasan Pesisir dan Kepulauan terbentang dari Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya hingga Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan yang memiliki pengembangan potensi pariwisata.

2.4.2 Perkembangan Investasi di Kabupaten Jembrana

Realisasi investasi di Kabupaten Jembrana berasal dari Alokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMA hanya tercatat pada



Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Provinsi Bali, sedangkan untuk PMDN tercatat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana.

Perkembangan investasi di Kabupaten Jembrana dari tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Investasi berskala nasional (PMDN)	Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN)
2020	7.097.926.394.109.00	521
2021	238.539.647.220.00	1.336
2022	309.029.066.624.00	171
2023	855.580.786.476.00	784

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jembrana

BAB III



SUMBER DATA

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah dari data registrasi dan data dari lintas sektor.

Data registrasi merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan selanjutnya dikonsolidasikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) tiap semester. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut berarti untuk publikasi Profil Perkembangan Kependudukan, data registrasi yang dipakai adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 pada tahun yang bersangkutan.

Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang anggaran dan belanja daerah, statistik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan pindah datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak. Variabel mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

BAB IV



KUANTITAS PENDUDUK

4.1 Jumlah Penduduk

Kabupaten Jembrana dengan luas wilayah 841.800 km² pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 330.221 jiwa, terdiri dari 165.808 jiwa laki-laki dan 164.413 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Melaya, dan Kecamatan Jembrana. Dari tabel 9 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Negara yaitu 100.451 jiwa (30,42%), sedangkan Kecamatan Pekutatan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 31.123 jiwa (9,42%) dari jumlah penduduk Kabupaten Jembrana.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jembrana Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
51.01.01	NEGARA	50.987	30,75	49.464	30,09	100.451	30,42
51.01.02	MENDOYO	35.129	21,19	35.019	21,30	70.148	21,24
51.01.03	PEKUTATAN	15.538	9,37	15.585	9,48	31.123	9,42
51.01.04	MELAYA	32.209	19,43	32.121	19,54	64.330	19,48
51.01.05	JEMBRANA	31.945	19,27	32.224	19,60	64.169	19,43
TOTAL		165.808	100,00	164.413	100,00	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana 2024

Dari tabel di atas secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun demikian terlihat bahwa di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Jembrana penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

4.1.1 Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km²). Seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana termasuk kabupaten yang padat walaupun Kabupaten Jembrana bukan daerah konsentrasi industri dan pariwisata. Tabel 8 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Jembrana. Dengan luas 841,8 Km², Kabupaten Jembrana didiami oleh 330.221 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 392 jiwa/Km². Dengan kata lain, rata-rata setiap Km² Kabupaten Jembrana didiami sebesar 392 jiwa. Kondisi ini bertambah dari tahun 2023 dimana kepadatan penduduk Kabupaten Jembrana pada tahun 2023 adalah 390 jiwa per Km².

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024



KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		n (jiwa)	(Km ²)	n (jiwa)
51.01.01	NEGARA	100.451	126,6 Km ²	793
51.01.02	MENDOYO	70.148	294,49 Km ²	238
51.01.03	PEKUTATAN	31.123	129,65 Km ²	240
51.01.04	MELAYA	64.330	197,19 Km ²	326
51.01.05	JEMBRANA	64.169	93,87 Km ²	684
TOTAL		330.221	841,8 Km²	392

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Negara merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 793 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Jember sebesar 684 jiwa/km², Kecamatan Melaya sebesar 326 jiwa/km², Kecamatan Pekutatan sebesar 240 jiwa/km², dan Kecamatan Mendoyo sebesar 238 jiwa/km². Kecamatan Mendoyo merupakan wilayah dengan wilayah terluas dan kepadatan terendah di Kabupaten Jember dengan kepadatan sebesar 238 jiwa/km².

Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember mempunyai jumlah penduduk terpadat dikarenakan wilayah pusat kota serta pusat pemerintahan dan ekonomi, yang berdampak pada cepatnya perkembangan penduduk di kedua kecamatan tersebut. Sehingga kedepannya perlu perhatian terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang, dan tata guna tanah. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka kedepan dua kecamatan tersebut akan menjadi wilayah yang padat dengan berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk (migrasi masuk dan migrasi keluar). Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun kedepan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 9. Data penduduk yang digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pusat tiap Semester 2 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan pertumbuhan dalam kurun waktu satu tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2024



KODE WILAYAH	KECAMATAN	SEMESTER 2 TAHUN 2023		SEMESTER 2 TAHUN 2024		RASIO PERTUMBUHAN PENDUDUK
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	%
51.01.01	NEGARA	99.757	30,36	100.451	30,42	0,069
51.01.02	MENDOYO	69.923	21,28	70.148	21,24	0,032
51.01.03	PEKUTATAN	31.043	9,45	31.123	9,42	0,026
51.01.04	MELAYA	64.013	19,48	64.330	19,48	0,049
51.01.05	JEMBRANA	63.824	19,43	64.169	19,43	0,054
TOTAL		328.560	100,00	330.221	100,00	0,050

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Jembrana Tahun 2024

Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jembrana kurun waktu 2023-2024 adalah sebesar 0,050 persen. Angka pertumbuhan naik di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Negara (0,069), Kecamatan Mendoyo (0,032), Kecamatan Pekutatan (0,026), Kecamatan Melaya (0,049), dan Kecamatan Jembrana (0,054).

4.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja, misalnya mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel. 10 Menunjukkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Jembrana paling besar merupakan penduduk kelompok umur 20-24 tahun 8,06 persen dan kemudian diikuti oleh kelompok umur 10-14 tahun 8,04 persen, dan terakhir kelompok umur 15-19 tahun 7,66 persen. Dengan demikian perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberdayakan dan menyediakan fasilitas pendidikan pada kelompok pendidikan dasar dan menengah serta lapangan pekerjaan bagi kelompok usia produktif. Disamping itu juga perlunya pemenuhan kebutuhan yang layak berdasarkan kelompok umur tersebut.

Tabel 10. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jembrana Tahun 2024

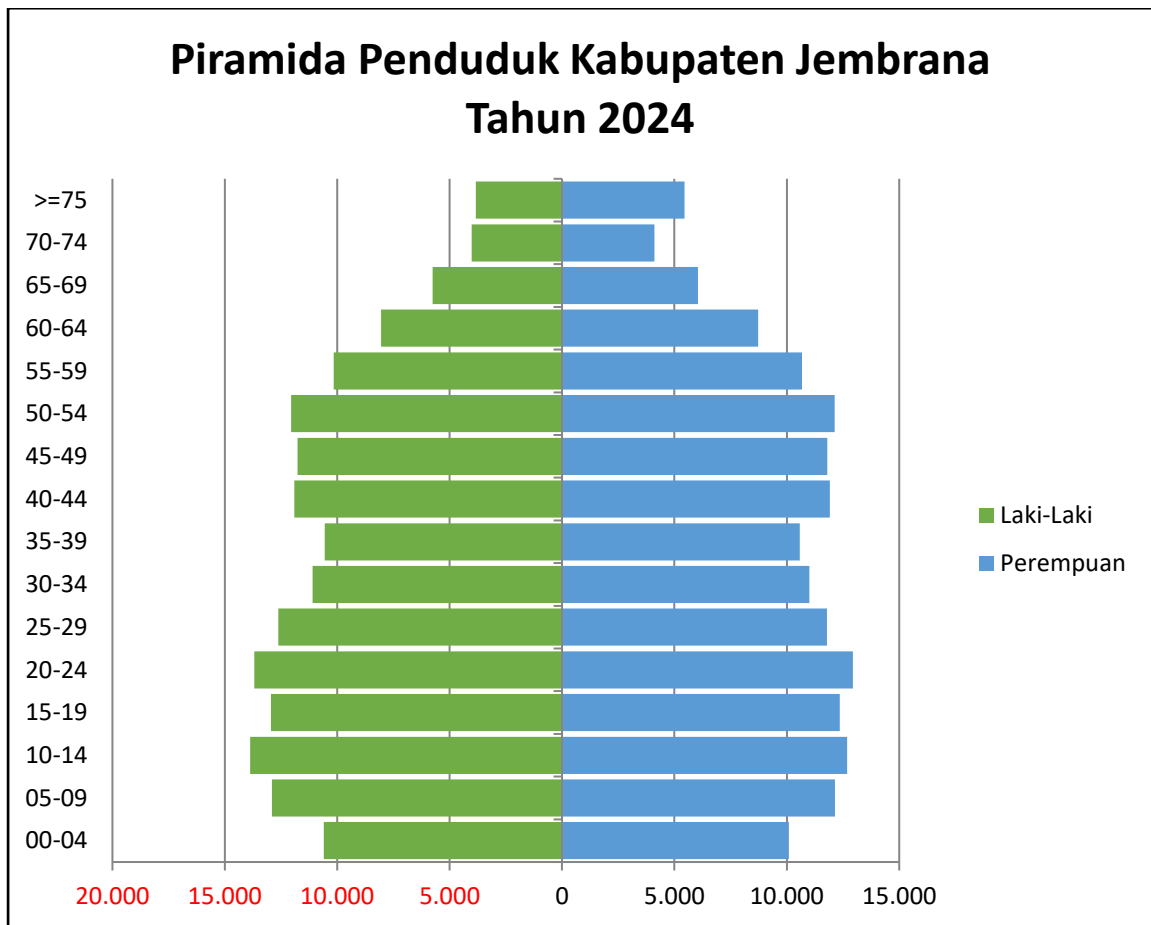


KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	10.602	6,39	10.091	6,14	20.693	6,27
05-09	12.911	7,79	12.144	7,39	25.055	7,59
10-14	13.869	8,36	12.676	7,71	26.545	8,04
15-19	12.943	7,81	12.351	7,51	25.294	7,66
20-24	13.683	8,25	12.933	7,87	26.616	8,06
25-29	12.614	7,61	11.790	7,17	24.404	7,39
30-34	11.096	6,69	11.009	6,70	22.105	6,69
35-39	10.555	6,37	10.579	6,43	21.134	6,40
40-44	11.913	7,18	11.908	7,24	23.821	7,21
45-49	11.759	7,09	11.805	7,18	23.564	7,14
50-54	12.045	7,26	12.127	7,38	24.172	7,32
55-59	10.159	6,13	10.670	6,49	20.829	6,31
60-64	8.052	4,86	8.718	5,30	16.770	5,08
65-69	5.760	3,47	6.048	3,68	11.808	3,58
70-74	4.016	2,42	4.112	2,50	8.128	2,46
75+	3.831	2,31	5.452	3,32	9.283	2,81
TOTAL	165.808	100,00	164.413	100,00	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Perlu diperhatikan juga penduduk Kabupaten Jember yang berusia kurang dari 15 tahun merupakan rentan umur yang cukup besar yaitu hampir seperempat penduduk Kabupaten Jember 21,89 persen. Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entri tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan asupan gizi yang baik. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, dapat bersaing dan memperoleh peluang kerja yang tersedia.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan secara grafik dengan piramida penduduk. Dasar piramida penduduk (sumbu horizontal) menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk (sumbu vertikal) bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Komposisi penduduk menurut umur atau piramida penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2024 dapat dilihat seperti gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida lebih kecil dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun di banding lima tahun sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-19 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan di butuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah dan juga lapangan kerja yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok 35-49 tahun yang merupakan usia produktif menunjukkan jumlah yang paling besar. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam bidang lapangan pekerjaan agar kelompok umur tersebut benar-benar produktif dan berdaya guna. Sedangkan pada kelompok umur 50 tahun keatas jumlah penduduk semakin mengecil. Namun dimasa depan, proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai di antisipasi dari sekarang karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti kesehatan, pelayanan lansia, serta kebutuhan sosial lainnya.



4.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 11. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Kabupaten Jember Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Σ PDDK	RJK
00-04	10.602	10.091	20.693	105,06
05-09	12.911	12.144	25.055	106,32
10-14	13.869	12.676	26.545	109,41
15-19	12.943	12.351	25.294	104,79
20-24	13.683	12.933	26.616	105,80
25-29	12.614	11.790	24.404	106,99
30-34	11.096	11.009	22.105	100,79
35-39	10.555	10.579	21.134	99,77
40-44	11.913	11.908	23.821	100,04
45-49	11.759	11.805	23.564	99,61
50-54	12.045	12.127	24.172	99,32
55-59	10.159	10.670	20.829	95,21
60-64	8.052	8.718	16.770	92,36
65-69	5.760	6.048	11.808	95,24
70-74	4.016	4.112	8.128	97,67
75+	3.831	5.452	9.283	70,27
TOTAL	165.808	164.413	330.221	100,85

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Dari tabel 11. nampak bahwa rasio jenis kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Kabupaten Jember adalah 100,85 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan berada pada kelompok umur 0-34 tahun dan kelompok umur 40-44 tahun. Sedangkan penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki berada pada kelompok umur 35-39 tahun dan usia 45 tahun keatas.

Teori yang mengatakan bahwa tingkat harapan hidup perempuan lebih besar daripada laki-laki adalah benar terjadi di Kabupaten Jember. Disamping itu pula kondisi tersebut menunjukkan jumlah status cerai mati perempuan pada usia tua juga tinggi di Kabupaten Jember. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah sehingga mereka mendapatkan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang layak dalam bidang sosial dan kesehatan.



Tabel 12. Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2024

KODE	KECAMATAN	L	P	SEX	KETERANGAN
51.01.01	NEGARA	50.987	49.464	103,08	Dalam 100 Perempuan ada 103 Laki-Laki
51.01.02	MENDOYO	35.129	35.019	100,31	Dalam 100 Perempuan ada 100 Laki-Laki
51.01.03	PEKUTATAN	15.538	15.585	99,70	Dalam 100 Perempuan ada 100 Laki-Laki
51.01.04	MELAYA	32.209	32.121	100,27	Dalam 100 Perempuan ada 100 Laki-Laki
51.01.05	JEMBRANA	31.945	32.224	99,13	Dalam 100 Perempuan ada 99 Laki-Laki
TOTAL		165.808	164.413	100,85	Dalam 100 Perempuan ada 101 Laki-Laki

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada tabel 12 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki berada di Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Jember. Di Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Melaya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

4.2.3 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah *Dependency Ratio*, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Σ PDDK	%
USIA MUDA (0 - 14 THN)	37.382	34.911	72.293	21,89
USIA PRODUKTIF (15 - 64 THN)	114.819	113.890	228.709	69,26
USIA TUA (65+ THN)	13.607	15.612	29.219	8,85
TOTAL	165.808	164.413	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Dari tabel 13 nampak bahwa 69,26 persen penduduk Kabupaten Jember merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) sebesar 21,89 persen, dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) sebesar 8,85 persen. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih banyak 929 orang daripada penduduk usia produktif perempuan. Pada kelompok umur tua (>=65 tahun) jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan usia harapan hidup penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki-laki.



Tabel 14. Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan, Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	USIA PRODUKTIF	USIA MUDA		USIA TUA		RK TOTAL (%)
		(15-64 thn)	(0 – 14 thn)		(65+ thn)		
		n (jiwa)	n (jiwa)	RK Muda (%)	n (jiwa)	RK Tua (%)	
51.01.01	NEGARA	69.556	23.673	34,03	7.222	10,38	44,42
51.01.02	MENDOYO	48.382	14.194	29,34	7.572	15,65	44,99
51.01.03	PEKUTATAN	21.779	6.232	28,61	3.112	14,29	42,90
51.01.04	MELAYA	44.596	14.205	31,85	5.529	12,40	44,25
51.01.05	JEMBRANA	44.396	13.989	31,51	5.784	13,03	44,54
TOTAL		228.709	72.293	31,61	29.219	12,78	44,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Memperhatikan komposisi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia tua seperti pada tabel diatas, diketahui rasio ketergantungan Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 44,38 per 100 penduduk usia produktif (usia kerja), yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Jember mempunyai tanggungan sekitar 44 penduduk usia non produktif. Selanjutnya 31,61 persen diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 12,78 persen lainnya berasal dari kelompok usia tua.

Apabila dilihat per kecamatan seperti pada tabel 14 maka Rasio Ketergantungan Muda tertinggi ada di Kecamatan Negara sebesar 34,03 persen dan terendah di Kecamatan Pekutatan sebesar 28,61 persen. Rasio Ketergantungan Tua tertinggi ada di Kecamatan Mendoyo yaitu sebesar 15,65 persen dan terendah di Kecamatan Negara sebesar 10,38 persen.

Untuk Rasio Ketergantungan Total tertinggi ada di Kecamatan Mendoyo, yaitu sebesar 44,99 persen yang diikuti Kecamatan Jember sebesar 44,54 persen, Kecamatan Negara sebesar 44,42 persen, Kecamatan Melaya sebesar 44,25 persen. Sedangkan Rasio Ketergantungan Total terendah ada di Kecamatan Pekutatan sebesar 42,90 persen.

Tabel 15. Rasio Ketergantungan Berdasarkan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024

JENIS KELAMIN	RASIO KETERGANTUNGAN (RK)		
	MUDA	TUA	TOTAL
LAKI-LAKI	32,56	11,85	44,41
PEREMPUAN	30,65	13,71	44,36
TOTAL	31,61	12,78	44,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Rasio Ketergantungan Kabupaten Jember jika dirinci menurut jenis kelamin, nampak pada tabel 15 bahwa secara keseluruhan angka beban laki-laki hampir sama dengan beban perempuan. Angka beban tanggungan perempuan lebih besar daripada laki-laki pada usia lanjut (Rasio Ketergantungan Tua). Hal ini dikarenakan perempuan yang



berusia lanjut terus bertambah jumlahnya melebihi laki-laki karena usia perempuan relatif lebih panjang karena banyak yang berstatus cerai mati.

4.3 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

4.3.1 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan yang memadai baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh seseorang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi, adalah jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh seseorang. Pada tabel 16 menyajikan tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan berdasarkan data pada Kartu Keluarga (KK). Data berikut merupakan gambaran kasar dari tingkat pendidikan di Kabupaten Jember, dengan catatan semakin rajin masyarakat mengubah elemen data pada Kartu Keluarga maka data semakin mendekati kenyataan di lapangan.

Tabel 16. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	52.055	31,39	50.395	30,65	102.450	31,02
BELUM TAMAT SD	12.485	7,53	11.592	7,05	24.077	7,29
TAMAT SD	31.692	19,11	42.606	25,91	74.298	22,50
TAMAT SLTP	18.302	11,04	18.998	11,56	37.300	11,30
TAMAT SLTA	41.407	24,97	31.741	19,31	73.148	22,15
D1/D2	1.875	1,13	1.193	0,73	3.068	0,93
D3/SARJANA MUDA	1.626	0,98	1.894	1,15	3.520	1,07
S1/DIV	5.864	3,54	5.753	3,50	11.617	3,52
S2	479	0,29	233	0,14	712	0,22
S3	23	0,01	8	0,00	31	0,01
TOTAL	165.808	100,00	164.413	100,00	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Tabel.16 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan relatif masih rendah. Hampir sepertiga penduduk Kabupaten Jember 22,50 persen tamat SD atau sederajat. Sedangkan jumlah terbesar kedua tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA sederajat yaitu sebesar 22,15 persen. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Jember perlu bekerja keras lagi dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terutama pada tingkat pendidikan dasar.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang tamat SD/sederajat dan tamat SLTP/Sederajat, jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya



pada jenjang pendidikan tingkat atas/lanjutan (SLTA keatas) jumlah penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikannya lebih banyak daripada perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka menunjukkan jenjang pendidikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki terutama pada kelompok penduduk miskin. Pemerintah Kabupaten Jemberana perlu memperhatikan kondisi di atas, mengingat saat ini adalah era globalisasi dan perlu adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dengan adanya program kesetaraan *gender*, terutama dalam memperoleh pendidikan, maka angka perempuan yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan jenjang pendidikannya diharapkan semakin kecil. Peningkatan akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin juga perlu ditingkatkan dengan pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu.

4.3.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Jemberana seperti kabupaten lainnya di Provinsi Bali sebagian besar memeluk agama Hindu disusul kemudian penduduk agama Islam dan agama Kristen. Sedangkan agama Katholik, agama Budha, dan agama Konghucu serta aliran Kepercayaan masih sangat sedikit.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, pemeluk agama Hindu terbesar ada di Kecamatan Mendoyo dan terkecil ada di Kecamatan Pekutatan. Sedangkan pemeluk agama Islam terbesar ada di Kecamatan Negara dan terkecil ada di Kecamatan Mendoyo. Tabel 17 juga menunjukkan di Kecamatan Negara penduduknya cukup padat dan heterogen sehingga Pemerintah Kabupaten Jemberana perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan tetap menjaga kualitas kerukunan antar umat beragama yang selama ini masih tetap terjaga.

Tabel 17. Penduduk Menurut Agama Tiap Kecamatan di Kabupaten Jemberana 2024

AGAMA DAN KEPERCAYAAN	KECAMATAN					TOTAL
	51.01.01	51.01.02	51.01.03	51.01.04	51.01.05	
	NEGARA	MENDOYO	PEKUTATAN	MELAYA	JEMBRANA	
ISLAM	45.792	5.412	5.799	17.851	13.676	88.530
KRISTEN	1.349	180	62	2.092	513	4.196
KATHOLIK	732	30	251	1.295	361	2.669
HINDU	52.111	64.503	25.006	43.024	49.187	233.831
BUDHA	451	23	5	67	429	975
KONGHUCHU	16	0	0	0	1	17
KEPERCAYAAN	0	0	0	1	2	3



AGAMA DAN KEPERCAYAAN	KECAMATAN					TOTAL
	51.01.01	51.01.02	51.01.03	51.01.04	51.01.05	
	NEGARA	MENDOYO	PEKUTATAN	MELAYA	JEMBRANA	
TOTAL	100.451	70.148	31.123	64.330	64.169	330.221

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

4.3.3 Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program administrasi kependudukan serta pembangunan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk yang berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak mempunyai banyak alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Umur perkawinan pertama juga berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk mengasuh anak, serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 18. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Tahun 2024

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
BELUM KAWIN	75.100	45,29	63.013	38,33	138.113	41,82
KAWIN	83.602	50,42	84.197	51,21	167.799	50,81
CERAI HIDUP	2.869	1,73	3.754	2,28	6.623	2,01
CERAI MATI	4.237	2,56	13.449	8,18	17.686	5,36
TOTAL	165.808	100,00	164.413	100,00	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember Tahun 2024

Tabel 18 diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jember didominasi oleh penduduk berstatus kawin baik pada penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan sebesar 50,81 persen. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja sehingga menunda usia perkawinan. Disamping itu juga laki-laki dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga dan mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sedangkan pada status kawin, penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu.



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggalkan istri, lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut sudah mandiri secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai dan enggan untuk menikah lagi.

Tabel 19. Penduduk Kabupaten Jember Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Status Kawin Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	STATUS KAWIN								TOTAL	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI			
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
15-19	25.086	9,73	206	0,08	2	0,00	0	0,00	25.294	9,81
20-24	21.571	8,36	4.939	1,91	97	0,04	9	0,00	26.616	10,32
25-29	9.555	3,70	14.374	5,57	422	0,16	53	0,02	24.404	9,46
30-34	3.090	1,20	18.100	7,02	773	0,30	142	0,06	22.105	8,57
35-39	1.540	0,60	18.428	7,14	916	0,36	250	0,10	21.134	8,19
40-44	1.125	0,44	21.081	8,17	1.124	0,44	491	0,19	23.821	9,24
45-49	947	0,37	20.791	8,06	1.018	0,39	808	0,31	23.564	9,14
50-54	833	0,32	21.089	8,18	867	0,34	1.383	0,54	24.172	9,37
55-59	684	0,27	17.480	6,78	581	0,23	2.084	0,81	20.829	8,08
60-64	557	0,22	13.276	5,15	367	0,14	2.570	1,00	16.770	6,50
65-69	319	0,12	8.564	3,32	196	0,08	2.729	1,06	11.808	4,58
70-74	238	0,09	5.307	2,06	122	0,05	2.461	0,95	8.128	3,15
>75	275	0,11	4.164	1,61	138	0,05	4.706	1,82	9.283	3,60
TOTAL	65.820	25,52	167.799	65,06	6.623	2,57	17.686	6,86	257.928	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember Tahun 2024

Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 15-24 tahun cukup tinggi. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang masih mengenyam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi ada pada kelompok umur 25-54 tahun. Pada rentang umur tersebut memang wajar penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan sudah berstatus menikah.

Menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus kawin dan cerai hidup pada kelompok umur 15-19 tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah terutama untuk lebih keras dalam rangka menekan angka perkawinan usia dini, dimana pada umur



tersebut biasanya belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga. Sedangkan proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup paling banyak berada pada rentang umur 30-49 tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait untuk melakukan tindakan pembinaan perkawinan dan pencegahan perceraian. Hal ini sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial yang berkembang saat ini. Penduduk berumur muda (umur 15-29) yang cerai hidup biasanya segera melakukan perkawinan kembali sehingga proporsi mereka lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang berstatus cerai mati. Sementara penduduk yang berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok di atasnya yaitu umur 55 tahun keatas.

Rata-Rata Umur Kawin Pertama Metode SMAM

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah.

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Angka perkawinan umur pertama yang dihitung dengan metode SMAM di Kabupaten Jember pada tahun 2024 adalah 24 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata umur kawin pertama penduduk di Kabupaten Jember adalah umur 24 tahun..

4.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan

Informasi tentang jumlah penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah dan perencanaan pemberian bantuan/santunan kepada penyandang cacat. Selama ini perhatian terhadap penyandang cacat dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik.

Informasi jumlah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah bagi penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.



Tabel 20. Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Menurut Jenis Disabilitas dan Kecamatan, Tahun 2024

JENIS DISABILITAS	KECAMATAN					TOTAL
	51.01.01	51.01.02	51.01.03	51.01.04	51.01.05	
	NEGARA	MENDOYO	PEKUTATAN	MELAYA	JEMBRANA	
DISABILITAS FISIK	68	101	29	80	63	341
DISABILITAS NETRA/BUTA	30	17	8	10	6	71
DISABILITAS RUNGU/WICARA	54	40	25	60	30	209
DISABILITAS MENTAL/JIWA	91	78	35	39	42	285
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	18	18	10	14	16	76
DISABILITAS LAINNYA	14	18	8	21	23	84
TOTAL	275	272	115	224	180	1.066

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Pada tabel 20 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang cacat di Kabupaten Jembrana tidak terlalu banyak yaitu 1.066 jiwa atau 0,32 persen, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Jembrana yaitu 330.221 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jembrana untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya. Penyandang cacat terbanyak berada di Kecamatan Negara sejumlah 275 dan Kecamatan Mendoyo sejumlah 272, dan paling sedikit berada di Kecamatan Pekutatan sejumlah 115. Dilihat dari jenis kecacatan, jumlah terbanyak adalah penyandang cacat fisik yaitu 341 orang, diikuti penyandang cacat mental/jiwa sebesar 285 orang, dan paling sedikit adalah penyandang cacat netra/buta yaitu sebesar 71 orang.

Tabel 21. Jumlah Penyandang Cacat Kabupaten Jembrana Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin, Tahun 2024

JENIS DISABILITAS	JENIS KELAMIN		L + P
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
DISABILITAS FISIK	193	148	341
DISABILITAS NETRA/BUTA	35	36	71
DISABILITAS RUNGU/WICARA	112	97	209
DISABILITAS MENTAL/JIWA	161	124	285
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	46	30	76
DISABILITAS LAINNYA	43	41	84
TOTAL	590	476	1.066

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, maka penyandang cacat terbesar adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jenis kecacatan adalah cacat fisik yaitu sebesar 193 orang, diikuti perempuan dengan cacat fisik sebesar 148 orang. Sedangkan



jumlah terkecil adalah jenis penyandang netra/buta untuk laki-laki sebesar 35 orang dan cacat fisik dan mental untuk jenis kelamin perempuan sebesar 30 orang.

4.4 Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

4.4.1 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan, dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclearfamily*) dan keluarga luas (*extendedfamily*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahterannya, begitu pula sebaliknya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari tiga generasi yaitu orang tua, anak, menantu, dan cucu atau biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka sendiri, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung, dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 22. Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH		RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
51.01.01	NEGARA	100.451	30,42	31.483	31,23	3
51.01.02	MENDOYO	70.148	21,24	22.076	21,90	3
51.01.03	PEKUTATAN	31.123	9,42	8.530	8,46	4
51.01.04	MELAYA	64.330	19,48	18.691	18,54	3
51.01.05	JEMBRANA	64.169	19,43	20.035	19,87	3
TOTAL		330.221	100,00	100.815	100,00	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember Tahun 2024



Jumlah keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2024 sebesar 100.815 keluarga yang tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Negara memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 31.483 keluarga (30,42%), kemudian disusul oleh Kecamatan Mendoyo sebesar 22.076 keluarga (21,90%), Kecamatan Jember sebesar 20.035 keluarga (19,87%), dan Kecamatan Melaya sebesar 18.691 keluarga (18,54%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Pekutatan yaitu 8.530 keluarga (8,46%).

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Jember sebesar 3 orang per keluarga. Ini merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebesar 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga. Bertambahnya jumlah kepala keluarga (KK) dan menurunnya rata-rata anggota per keluarga salah satu indikasi bahwa di tahun 2024 Kabupaten Jember kepala keluarga banyak melakukan pisah/pecah KK salah satu faktor adalah karena faktor perkawinan (membentuk KK baru).

4.4.2 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*), dan pola pengasuhan anak. Dari tabel 23. nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri yaitu dari 88.132 kepala keluarga laki-laki (26,69%) dan status sebagai istri sebesar 78.633 orang (23,81%), sedangkan dari 12.683 kepala keluarga perempuan (3,84%) hanya 14 orang saja yang bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda (baik cerai hidup maupun cerai mati). Perempuan yang berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Tabel 23. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2024

STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
KEPALA KELUARGA	88.132	26,69	12.683	3,84	100.815	30,53
SUAMI	14	0,00	0	0,00	14	0,00
ISTRI	0	0,00	78.633	23,81	78.633	23,81
ANAK	71.027	21,51	59.390	17,98	130.417	39,49
MENANTU	91	0,03	1.053	0,32	1.144	0,35
CUCU	1.721	0,52	1.491	0,45	3.212	0,97
ORANG TUA	2.234	0,68	5.923	1,79	8.157	2,47
MERTUA	70	0,02	253	0,08	323	0,10



STATUS HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
FAMILI LAIN	2.397	0,73	4.652	1,41	7.049	2,13
PEMBANTU	4	0,00	16	0,00	20	0,01
LAINNYA	118	0,04	319	0,10	437	0,13
TOTAL	165.808	50,21	164.413	49,79	330.221	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember Tahun 2024

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah diluar keluarga inti yaitu yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu 20.119 (6,02%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten Jember jumlahnya tidak terlalu besar.

4.4.3 Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, dan pekerjaan penting untuk diketahui karena berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 24. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
51.01.01	NEGARA	27.260	27,04	4.223	4,19	31.483	31,23
51.01.02	MENDOYO	19.535	19,38	2.541	2,52	22.076	21,90
51.01.03	PEKUTATAN	7.584	7,52	946	0,94	8.530	8,46
51.01.04	MELAYA	16.295	16,16	2.396	2,38	18.691	18,54
51.01.05	JEMBRANA	17.458	17,32	2.577	2,56	20.035	19,87
TOTAL		88.132	87,42	12.683	12,58	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 24. Menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Jember tahun 2024 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Jember adalah laki-laki yaitu 88.132 (87,42%) kepala keluarga, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebesar 12.683 (12,58%) atau dengan perbandingannya sekitar 7:1, yang artinya dari 7 kepala keluarga laki-laki terdapat satu kepala keluarga perempuan. Perbandingan terbesar antara kepala keluarga laki-laki dengan kepala keluarga perempuan terdapat di Kecamatan Pekutatan yaitu 8:1 sedangkan terendah berada di Kecamatan Negara, Kecamatan Melaya, dan Kecamatan Jember dengan perbandingan 7:1.



Tabel 25. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember Tahun 2024

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
BELUM KAWIN	1.463	1,45	865	0,86	2.328	2,31
KAWIN	80.696	80,04	1.367	1,36	82.063	81,40
CERAI HIDUP	2.549	2,53	1.737	1,72	4.286	4,25
CERAI MATI	3.424	3,40	8.714	8,64	12.138	12,04
TOTAL	88.132	87,42	12.683	12,58	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember Tahun 2024

Pada umumnya kepala keluarga adalah berstatus kawin yaitu sejumlah 81,40 persen, dan mayoritas laki-laki sejumlah 80,04 persen. Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya sejumlah 2,31 persen. Meskipun demikian, perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai mati jika dilihat dari persentase, perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan kawin ulang, terutama apabila mereka telah memiliki anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun, tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan yang berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga, maupun keempat. Kondisi ini ada akan tetapi jumlahnya sedikit. Oleh sebab itu proporsi kepala keluarga perempuan berstatus kawin sebesar 10,78 persen. Patut diduga mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah yang berstatus sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebesar 2,31 persen. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal atau kepala keluarga tersebut memang hidup sendirian.

Tabel 26. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
05-09	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00



KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
10-14	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
15-19	52	0,05	26	0,03	2	0,00	0	0,00	80	0,08
20-24	361	0,36	1323	1,31	37	0,04	8	0,01	1.729	1,72
25-29	394	0,39	5.639	5,59	235	0,23	45	0,04	6.313	6,26
30-34	194	0,19	8.006	7,94	463	0,46	117	0,12	8.780	8,71
35-39	150	0,15	8.681	8,61	587	0,58	214	0,21	9.632	9,55
40-44	177	0,18	10.329	10,25	782	0,78	440	0,44	11.728	11,63
45-49	194	0,19	10.541	10,46	713	0,71	723	0,72	12.171	12,07
50-54	191	0,19	10.977	10,89	633	0,63	1.227	1,22	13.028	12,92
55-59	182	0,18	9.233	9,16	406	0,40	1.661	1,65	11.482	11,39
60-64	179	0,18	7.063	7,01	223	0,22	1.880	1,86	9.345	9,27
65-69	107	0,11	4.755	4,72	96	0,10	1.849	1,83	6.807	6,75
70-74	67	0,07	3.103	3,08	59	0,06	1.511	1,50	4.740	4,70
>75	72	0,07	2.387	2,37	50	0,05	2.463	2,44	4.972	4,93
TOTAL	2.328	2,31	82.063	81,40	4.286	4,25	12.138	12,04	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Dari tabel 26 terlihat bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Jember dikendalikan oleh kepala keluarga yang berumur antara 25-64 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember merupakan keluarga yang berada pada kelompok usia produktif. Dan yang menarik adalah adanya kepala keluarga pada kelompok umur 15-19 tahun. Walaupun persentasenya sangat kecil yaitu sejumlah 0,08 persen, namun perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember, karena pada kelompok umur 15-19 tahun dikaitkan dengan wajib belajar bagi anak usia sekolah serta kemandirian dan kemandirian untuk menjadi seorang kepala keluarga.

Tabel 27a. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI									
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
05-09	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
10-14	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
15-19	31	0,04	26	0,03	0	0,00	0	0,00	57	0,06
20-24	280	0,32	1309	1,49	13	0,01	1	0,00	1.603	1,82
25-29	319	0,36	5.611	6,37	130	0,15	9	0,01	6.069	6,89
30-34	140	0,16	7.950	9,02	284	0,32	38	0,04	8.412	9,54
35-39	117	0,13	8.588	9,74	370	0,42	65	0,07	9.140	10,37
40-44	127	0,14	10.197	11,57	509	0,58	146	0,17	10.979	12,46
45-49	133	0,15	10.393	11,79	432	0,49	204	0,23	11.162	12,67
50-54	112	0,13	10.814	12,27	367	0,42	320	0,36	11.613	13,18



KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI									
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
55-59	76	0,09	9.075	10,30	238	0,27	395	0,45	9.784	11,10
60-64	67	0,08	6.922	7,85	106	0,12	498	0,57	7.593	8,62
65-69	33	0,04	4.629	5,25	53	0,06	523	0,59	5.238	5,94
70-74	13	0,01	2.975	3,38	28	0,03	455	0,52	3.471	3,94
>75	10	0,01	2.207	2,50	19	0,02	770	0,87	3.006	3,41
TOTAL	1.463	1,66	80.696	91,56	2.549	2,89	3.424	3,89	88.132	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 27b. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Perempuan, dan Status Kawin Kabupaten Jember Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA PEREMPUAN									
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		TOTAL	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	1	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,01
05-09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10-14	2	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,02
15-19	21	0,17	0	0,00	2	0,02	0	0,00	23	0,18
20-24	81	0,64	14	0,11	24	0,19	7	0,06	126	0,99
25-29	75	0,59	28	0,22	105	0,83	36	0,28	244	1,92
30-34	54	0,43	56	0,44	179	1,41	79	0,62	368	2,90
35-39	33	0,26	93	0,73	217	1,71	149	1,17	492	3,88
40-44	50	0,39	132	1,04	273	2,15	294	2,32	749	5,91
45-49	61	0,48	148	1,17	281	2,22	519	4,09	1.009	7,96
50-54	79	0,62	163	1,29	266	2,10	907	7,15	1.415	11,16
55-59	106	0,84	158	1,25	168	1,32	1.266	9,98	1.698	13,39
60-64	112	0,88	141	1,11	117	0,92	1.382	10,90	1.752	13,81
65-69	74	0,58	126	0,99	43	0,34	1.326	10,45	1.569	12,37
70-74	54	0,43	128	1,01	31	0,24	1056	8,33	1.269	10,01
>75	62	0,49	180	1,42	31	0,24	1.693	13,35	1.966	15,50
TOTAL	865	6,82	1.367	10,78	1.737	13,70	8.714	68,71	12.683	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 27a dan table 27b menyajikan gambaran lengkap mengenai struktur umur kepala keluarga di Kabupaten Jember menurut pengelompokan umur lima tahunan, status kawin, dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh gambaran proporsi tertinggi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin berada pada kelompok umur 50-54 tahun (13,18%), sedangkan proporsi kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur >75 tahun (15,50%). Kepala keluarga laki-laki yang berstatus



cerai hidup terbanyak berada pada kelompok umur 40-44 tahun (0,58%). Proporsi tertinggi kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai hidup berada pada kelompok umur 45-49 tahun (2,22%). Hal ini berarti kerap terjadi perceraian pada usia perkawinan produktif yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga sosial. Jika dikaitkan dengan kelompok umur tersebut (45-49 tahun), kepala keluarga laki-laki yang melakukan perceraian kemudian melangsungkan perkawinan kedua, sedangkan kepala keluarga perempuan tetap berstatus cerai hidup (tetap menjadi kepala keluarga). Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Jember agar kedepannya angka perceraian bisa terus ditekan. Sedangkan kepala keluarga yang berstatus cerai mati rata-rata berada pada kelompok umur 55 tahun ke atas.

Dari tabel 27b juga nampak bahwa perempuan menjadi kepala keluarga tertinggi berada pada usia 45 tahun keatas. Hal tersebut terjadi karena kepala keluarga perempuan memang telah berstatus cerai mati ataupun cerai hidup, yang mengharuskan mereka menjadi kepala keluarga. Kondisi ini perlu perhatian lebih lanjut, karena keluarga yang dikepalai oleh perempuan biasanya mempunyai status ekonomi yang rendah. Perempuan pada umur usia lanjut biasanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga rendah. Untuk kebutuhan pemberdayaan terhadap keluarga tersebut perlu perhatian khusus, apakah keluarganya berstatus bekerja atau tidak bekerja.

Dalam hal intervensi kemiskinan, data keluarga ini juga dibutuhkan karena kemiskinan individu berasal dari kemiskinan keluarga. Oleh sebab itu untuk menangani kemiskinan, unit yang harus diperhatikan adalah unit keluarga atau dengan kata lain dengan melakukan pemberdayaan keluarga, dimana seluruh potensi anggota keluarga harus ditingkatkan.

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

Tabel 28. Distribusi Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Jember Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	996	0,99	794	0,79	1.790	1,78
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	2.697	2,68	939	0,93	3.636	3,61



TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TAMAT SD/SEDERAJAT	26.657	26,44	6.603	6,55	33.260	32,99
SLTP/SEDERAJAT	14.129	14,01	1.474	1,46	15.603	15,48
SLTA/SEDERAJAT	34.979	34,70	2.184	2,17	37.163	36,86
DIPLOMA I/II	1.573	1,56	108	0,11	1.681	1,67
AKADEMI/DIPLOMA III/SARMUD	1.431	1,42	146	0,14	1.577	1,56
DIPLOMA IV/STRATA I	5.209	5,17	409	0,41	5.618	5,57
STRATA II	444	0,44	25	0,02	469	0,47
STRATA III	17	0,02	1	0,00	18	0,02
TOTAL	88.132	87,42	12.683	12,58	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Dari tabel 28 di atas terlihat di Kabupaten Jember sebagian besar tingkat pendidikan kepala keluarga adalah Tamat SLTA/Sederajat sebesar 36,86 persen. Secara keseluruhan gambaran tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih berpendidikan SLTA ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga kemungkinan mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja yaitu sejumlah 77.452 (76,83%), lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan yaitu sejumlah 6.751 (6,70%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, dilihat dari persentase di atas, pada saat ini sebagian besar perempuan juga ikut terjun ke pasar kerja.

Hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu jumlah keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang Belum/Tidak Bekerja yang jumlahnya walaupun kecil sebesar 8,26 persen dan kepala keluarga yang berstatus Pelajar/Mahasiswa sebesar 1,19 persen. Kepala keluarga yang tidak bekerja dapat disebabkan karena sudah memasuki usia tidak produktif atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Mereka perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah sehingga berdampak bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian diduga mereka tidak mempunyai penghasilan sehingga Pemerintah Kabupaten Jember perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.



Tabel 29. Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024

STATUS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
BELUM/TIDAK BEKERJA	7.624	7,56	702	0,70	8.326	8,26
SUDAH BEKERJA	77.452	76,83	6.751	6,70	84.203	83,52
MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0,00	4.940	4,90	4.941	4,90
PELAJAR/MAHASISWA	1.080	1,07	122	0,12	1.202	1,19
PENSIUNAN	1.975	1,96	168	0,17	2.143	2,13
TOTAL	88.132	87,42	12.683	12,58	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Selanjutnya pada Tabel 30 menunjukkan jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kepala keluarga untuk menunjang perekonomian keluarga.

Tabel 30. Distribusi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Jember, Tahun 2024

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BELUM BEKERJA	7.624	7,56	702	0,70	8.326	8,26
MENGURUS RUMAH TANGGA	1	0,00	4.940	4,90	4.941	4,90
PELAJAR/MAHASISWA	1.080	1,07	122	0,12	1.202	1,19
PENSIUNAN	1.975	1,96	168	0,17	2.143	2,13
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.240	2,22	167	0,17	2.407	2,39
TENTARA NASIONAL INDONESIA	949	0,94	0	0,00	949	0,94
KEPOLISIAN RI (POLRI)	895	0,89	2	0,00	897	0,89
PERDAGANGAN	1.161	1,15	437	0,43	1.598	1,59
PETANI/PEKEBUN	20.369	20,20	2.286	2,27	22.655	22,47
PETERNAK	179	0,18	12	0,01	191	0,19
NELAYAN/PERIKANAN	4.300	4,27	8	0,01	4.308	4,27
INDUSTRI	32	0,03	1	0,00	33	0,03
KONSTRUKSI	38	0,04	1	0,00	39	0,04
TRANSPORTASI	251	0,25	2	0,00	253	0,25
KARYAWAN SWASTA	14.371	14,25	643	0,64	15.014	14,89
KARYAWAN BUMN	202	0,20	4	0,00	206	0,20
KARYAWAN BUMD	95	0,09	4	0,00	99	0,10
KARYAWAN HONORER	522	0,52	22	0,02	544	0,54
BURUH HARIAN LEPAS	7.520	7,46	550	0,55	8.070	8,00
BURUH TANI/PERKEBUNAN	3.878	3,85	446	0,44	4.324	4,29
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1.518	1,51	31	0,03	1.549	1,54
BURUH PETERNAKAN	54	0,05	3	0,00	57	0,06
PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	0,00	64	0,06	66	0,07
TUKANG CUKUR	18	0,02	0	0,00	18	0,02
TUKANG LISTRIK	48	0,05	0	0,00	48	0,05
TUKANG BATU	341	0,34	1	0,00	342	0,34



JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TUKANG KAYU	758	0,75	0	0,00	758	0,75
TUKANG SOL SEPATU	8	0,01	1	0,00	9	0,01
TUKANG LAS/PANDAI BESI	113	0,11	1	0,00	114	0,11
TUKANG JAHIT	115	0,11	47	0,05	162	0,16
TUKANG GIGI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PENATA RIAS	1	0,00	3	0,00	4	0,00
PENATA BUSANA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENATA RAMBUT	2	0,00	9	0,01	11	0,01
MEKANIK	282	0,28	0	0,00	282	0,28
SENIMAN	64	0,06	1	0,00	65	0,06
TABIB	8	0,01	0	0,00	8	0,01
PARAJI	6	0,01	1	0,00	7	0,01
PERANCANG BUSANA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENTERJEMAH	2	0,00	0	0,00	2	0,00
IMAM MASJID	2	0,00	0	0,00	2	0,00
PENDETA	71	0,07	2	0,00	73	0,07
PASTOR	3	0,00	0	0,00	3	0,00
WARTAWAN	11	0,01	2	0,00	13	0,01
USTADZ/MUBALIGH	9	0,01	1	0,00	10	0,01
JURU MASAK	3	0,00	5	0,00	8	0,01
PROMOTOR ACARA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPR RI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPD RI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA BPK	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRESIDEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL PRESIDEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA MAHKAMAH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DUTA BESAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GUBERNUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL GUBERNUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BUPATI	2	0,00	0	0,00	2	0,00
WAKIL BUPATI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WALIKOTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL WALIKOTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPRD PROP.	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	15	0,01	0	0,00	15	0,01
DOSEN	40	0,04	3	0,00	43	0,04
GURU	672	0,67	87	0,09	759	0,75
PILOT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENGACARA	10	0,01	1	0,00	11	0,01
NOTARIS	13	0,01	3	0,00	16	0,02



JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
ARSITEK	9	0,01	0	0,00	9	0,01
AKUNTAN	4	0,00	0	0,00	4	0,00
KONSULTAN	10	0,01	0	0,00	10	0,01
DOKTER	78	0,08	5	0,00	83	0,08
BIDAN	0	0,00	11	0,01	11	0,01
PERAWAT	50	0,05	6	0,01	56	0,06
APOTEKER	4	0,00	0	0,00	4	0,00
PSIKIATER/PSIKOLOG	2	0,00	0	0,00	2	0,00
PENYIAR TELEVISI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENYIAR RADIO	2	0,00	0	0,00	2	0,00
PELAUT	32	0,03	0	0,00	32	0,03
PENELITI	7	0,01	2	0,00	9	0,01
SOPIR	1.622	1,61	0	0,00	1.622	1,61
PIALANG	3	0,00	1	0,00	4	0,00
PARANORMAL	3	0,00	0	0,00	3	0,00
PEDAGANG	1.711	1,70	906	0,90	2.617	2,60
PERANGKAT DESA	245	0,24	8	0,01	253	0,25
KEPALA DESA	14	0,01	0	0,00	14	0,01
BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,00	3	0,00	3	0,00
WIRASWASTA	12.409	12,31	953	0,95	13.362	13,25
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN	43	0,04	5	0,00	48	0,05
ARTIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ATLIT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CHEFF	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANAJER	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TENAGA TATA USAHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERATOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEKERJA PENGOLAHAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TEKNISI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ASISTEN AHLI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEKERJAAN LAINNYA	8	0,01	0	0,00	8	0,01
TOTAL	88.132	87,42	12.683	12,58	100.815	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Jember Tahun 2024

Dikarenakan Kabupaten Jember merupakan daerah pertanian maka dilihat dari jenis pekerjaan pada kepala keluarga di Kabupaten Jember, jenis pekerjaan terbesar adalah sebagai petani/pekebun yaitu sejumlah 22,47 persen yaitu hampir sepertiga jumlah keseluruhan kepala keluarga, diikuti Karyawan Swasta yaitu sejumlah 14,89 persen, dan Wiraswasta yaitu sejumlah 13,25 persen. Yang perlu mendapat perhatian adalah kepala keluarga yang Belum/Tidak Bekerja, Mengurus Rumah Tangga dan Pelajar/Mahasiswa terutama kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan, karena besar kemungkinan berdampak pada meningkatnya jumlah keluarga miskin. Kondisi ini perlu segera dicarikan



solusi dan jalan keluarnya sehingga tidak banyak berdampak pada sector sosial dan ekonomi.



BAB V

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah social, dan masalah lainnya. Kualitas pembangunan manusia secara internasional diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri dari tingkat pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir), serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

5.1 Kesehatan

5.1.1 Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan dan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Tabel 31. Rasio Anak dan Perempuan, Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANAK USIA 0-4 TAHUN	PEREMPUAN USIA 15-49TH	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
51.01.01	NEGARA	6.953	25.672	27,08
51.01.02	MENDOYO	4.061	16.599	24,47
51.01.03	PEKUTATAN	1.752	7.736	22,65
51.01.04	MELAYA	4.060	16.458	24,67
51.01.05	JEMBRANA	3.867	15.910	24,31
TOTAL		20.693	82.375	25,12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Jember, Tahun 2024

Pada tahun 2024 besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Jember sebesar 25,12. Hal ini berarti diantara seratus perempuan produktif usia 15-49 tahun terdapat 25 balita. Angka ini mengindikasikan tingkat *fertilitas* yang cukup baik karena tidak begitu tingginya jumlah balita di dalam usia produktif wanita. CWR tertinggi di Kecamatan Negara sebesar 27,08 sedangkan CWR terendah di Kecamatan Pekutatan yaitu sebesar 22,65.

5.1.2 Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka kelahiran kasar (CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu sehingga bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Tabel 32 menunjukkan pada tahun 2024 Angka Kelahiran Kasar



di Kabupaten Jember adalah 8,79 atau dapat diartikan terdapat 9 bayi lahir dari 1.000 penduduk.

Tabel 32. Angka Kelahiran Kasar Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAHIR	JUMLAH PENDUDUK		ANGKA KELAHIRAN KASAR (CBR)
			AWAL TAHUN	AKHIR TAHUN	
51.01.01	NEGARA	1.020	100.074	100.451	10,19
51.01.02	MENDOYO	554	70.003	70.148	7,91
51.01.03	PEKUTATAN	248	31.111	31.123	7,97
51.01.04	MELAYA	522	64.183	64.330	8,13
51.01.05	JEMBRANA	550	63.982	64.169	8,6
TOTAL		2.894	329.353	330.221	8,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024 (diolah)

5.1.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* adalah kematian bayi di bawah usia 1 tahun tiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator terhadap persediaan, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan prenatal. Capaian kinerja Angka Kematian Bayi di Kabupaten Jember sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 33. Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember Tahun 2019 - 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKB	8,8	7,81	9,25	12,1	9,9	9,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja AKB di Kabupaten Jember lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif dan apabila dirata-ratakan mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, maka AKB Kabupaten Jember sudah mencapai target MDGs.

5.1.4 Angka Kematian Balita (AKABA)

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat lima tahun atau secara umum disebut umur 0-4 tahun. Kematian balita dapat disebabkan dari kondisi pasca melahirkan, kesehatan lingkungan yang kurang baik, kecukupan gizi, penyakit menular, ataupun kecelakaan. Capaian kinerja Angka Kematian Balita di Kabupaten Jember sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 34. Angka Kematian Balita, Kabupaten Jembrana Tahun 2019 - 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKABA	9,9	1,2	1,4	1,5	2,1	1,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Berdasarkan tabel 34 menunjukkan bahwa capaian kinerja AKABA di Kabupaten Jembrana dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif dan apabila dirata-ratakan mencapai 3 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup maka AKABA di Kabupaten Jembrana sudah mencapai target MDGs.

5.1.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* menunjukkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini dipergunakan untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan, serta fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Pada tabel 35 terlihat bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuatif. Data lima tahun terakhir menunjukkan angka terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 116 orang ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 185 orang ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 35. Angka Kematian Ibu, Kabupaten Jembrana Tahun 2019 - 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKI	116	118	185	180	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

5.2 Pendidikan

5.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selama lima tahun terakhir APK di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya sebagaimana ditampilkan pada tabel 36.



Tabel 36. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	102,15	103,49	102,64	103,48	90,47	89,80
SLTP/MTs	100,79	93,86	98,23	98,02	87,06	87,72

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana

Dari angka APK pada tabel 36 menunjukkan bahwa daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan formal di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah melihat data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sudah diatas 100% namun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Perkembangan nilai APM di Kabupaten Jembrana dalam lima tahun terakhir dapat disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 37. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2024

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	96,50	97,73	95,44	95,54	88,95	83,02
SLTP/MTs	80,01	93,80	76,51	77,36	79,94	82,49

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana

5.3 Ekonomi

5.3.1 Angkatan Kerja Menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas (Tenaga Kerja/*manpower*) dan tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).



Tabel 38. Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA			TENAGA KERJA			TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LK	PR	L + P	LK	PR	L + P	LK	PR	L + P
51.01.01	NEGARA	31.713	17.249	48.962	35.253	34.303	69.556	89,96	50,28	70,39
51.01.02	MENDOYO	21.346	15.891	37.237	24.304	24.078	48.382	87,83	66,00	76,96
51.01.03	PEKUTATAN	9.464	7.305	16.769	10.829	10.950	21.779	87,39	66,71	77,00
51.01.04	MELAYA	19.916	11.937	31.853	22.376	22.220	44.596	89,01	53,72	71,43
51.01.05	JEMBRANA	19.493	12.315	31.808	22.057	22.339	44.396	88,38	55,13	71,65
TOTAL		101.932	64.697	166.629	114.819	113.890	228.709	88,78	56,81	72,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Dari Tabel 38 ditunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi berada pada jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 101.932 orang, dengan posisi tertinggi berada di Kecamatan Negara yaitu sejumlah 31.713 orang dan posisi terendah ada di Kecamatan Pekutatan yaitu sejumlah 9.464 orang.

Untuk jumlah tenaga kerja tertinggi berada pada jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 114.819 orang, dengan posisi tertinggi berada di Kecamatan Negara yaitu sejumlah 35.253 orang dan posisi terendah ada di Kecamatan Pekutatan yaitu sejumlah 10.829 orang. Dan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki sejumlah 89 orang dan perempuan sebesar 57 orang.

Tabel 39. Angka Penyerapan Kerja (*Employment Rate*) Kab. Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	TIDAK BEKERJA			BEKERJA			TENAGA KERJA		
		LK	PR	L + P	LK	PR	L + P	LK	PR	L + P
51.01.01	NEGARA	9.407	7.463	16.870	22.306	9.786	32.092	35.253	34.303	69.556
51.01.02	MENDOYO	6.127	5.187	11.314	15.219	10.704	25.923	24.304	24.078	48.382
51.01.03	PEKUTATAN	2.496	2.148	4.644	6.968	5.157	12.125	10.829	10.950	21.779
51.01.04	MELAYA	6.310	4.879	11.189	13.606	7.058	20.664	22.376	22.220	44.596
51.01.05	JEMBRANA	5.296	4.383	9.679	14.197	7.932	22.129	22.057	22.339	44.396
TOTAL		29.636	24.060	53.696	72.296	40.637	112.933	114.819	113.890	228.709

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Angka ini membuktikan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Jember sudah cukup terserap di dunia kerja. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jember juga diharapkan terus meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.



Tabel 40. Distribusi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024

PENDIDIKAN	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BLM SEKOLAH	14.864	14,58	13.911	21,50	28.775	17,27
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	5.350	5,25	3.805	5,88	9.155	5,49
TAMAT SD/SEDERAJAT	21.298	20,89	15.648	24,19	36.946	22,17
SLTP/SEDERAJAT	14.543	14,27	7.897	12,21	22.440	13,47
SLTA/SEDERAJAT	37.343	36,64	16.464	25,45	53.807	32,29
DIPLOMA I/II	1.704	1,67	809	1,25	2.513	1,51
AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	1.335	1,31	1.428	2,21	2.763	1,66
DIPLOMA IV/STRATA I	5.083	4,99	4.519	6,98	9.602	5,76
STRATA-II	393	0,39	209	0,32	602	0,36
STRATA-III	19	0,02	7	0,01	26	0,02
TOTAL	101.932	100,00	64.697	100,00	166.629	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dari Tabel 40 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Jember menurut tingkat pendidikan formalnya sudah cukup baik, karena didominasi angkatan kerja yang berpendidikan Tamat SLTA/Sederajat sejumlah 32,29 persen, tetapi kemudian disusul berpendidikan SD/ sederajat 22,17 persen, berpendidikan Tamat SLTP/ sederajat sebesar 13,78 persen, dan berpendidikan Belum Tamat SD/ Sederajat sebesar 17,27 persen. Jika dikaitkan dengan angka APK dan APM di Kabupaten Jember, status tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Kartu Keluarga (KK) perlu selalu diperbaharui. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember perlu mencari solusi atau membuat inovasi khususnya kerjasama dengan instansi *stakeholder* di bidang pendidikan di Kabupaten Jember.

Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase angkatan kerja laki-laki yang menamatkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Angkatan kerja laki-laki yang tidak/ belum sekolah lebih besar dibandingkan perempuan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan akses pada bidang pendidikan dan keterampilan kerja.

Tabel 41. Distribusi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024

JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.253	1,99	1.684	1,49	3.937	3,49
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	970	0,86	7	0,01	977	0,87
KEPOLISIAN RI (POLRI)	968	0,86	47	0,04	1.015	0,90



JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
PERDAGANGAN	990	0,88	1.736	1,54	2.726	2,41
PETANI/PEKEBUN	16.325	14,46	11.184	9,90	27.509	24,36
PETERNAK	144	0,13	51	0,05	195	0,17
NELAYAN/PERIKANAN	3.961	3,51	41	0,04	4.002	3,54
INDUSTRI	29	0,03	17	0,02	46	0,04
KONSTRUKSI	34	0,03	3	0,00	37	0,03
TRANSPORTASI	235	0,21	6	0,01	241	0,21
KARYAWAN SWASTA	15.692	13,89	9.384	8,31	25.076	22,20
KARYAWAN BUMN	200	0,18	100	0,09	300	0,27
KARYAWAN BUMD	90	0,08	41	0,04	131	0,12
KARYAWAN HONORER	586	0,52	607	0,54	1.193	1,06
BURUH HARIAN LEPAS	7.294	6,46	2.408	2,13	9.702	8,59
BURUH TANI/PERKEBUNAN	3.005	2,66	2.050	1,82	5.055	4,48
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1.407	1,25	70	0,06	1.477	1,31
BURUH PETERNAKAN	46	0,04	16	0,01	62	0,05
PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0,00	242	0,21	245	0,22
TUKANG CUKUR	16	0,01	3	0,00	19	0,02
TUKANG LISTRIK	40	0,04	0	0,00	40	0,04
TUKANG BATU	295	0,26	5	0,00	300	0,27
TUKANG KAYU	654	0,58	2	0,00	656	0,58
TUKANG SOL SEPATU	7	0,01	2	0,00	9	0,01
TUKANG LAS/PANDAI BESI	107	0,09	2	0,00	109	0,10
TUKANG JAHIT	86	0,08	290	0,26	376	0,33
TUKANG GIGI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENATA RIAS	2	0,00	25	0,02	27	0,02
PENATA BUSANA	0	0,00	1	0,00	1	0,00
PENATA RAMBUT	2	0,00	26	0,02	28	0,02
MEKANIK	286	0,25	2	0,00	288	0,26
SENIMAN	63	0,06	3	0,00	66	0,06
TABIB	5	0,00	2	0,00	7	0,01
PARAJI	6	0,01	1	0,00	7	0,01
PERANCANG BUSANA	0	0,00	2	0,00	2	0,00
PENTERJEMAH	2	0,00	3	0,00	5	0,00
IMAM MASJID	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENDETA	38	0,03	8	0,01	46	0,04
PASTOR	6	0,01	0	0,00	6	0,01
WARTAWAN	10	0,01	3	0,00	13	0,01
USTADZ/MUBALIGH	6	0,01	2	0,00	8	0,01



JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
JURU MASAK	3	0,00	13	0,01	16	0,01
PROMOTOR ACARA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPR RI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPD RI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA BPK	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRESIDEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL PRESIDEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DUTA BESAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GUBERNUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL GUBERNUR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
BUPATI	2	0,00	0	0,00	2	0,00
WAKIL BUPATI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WALIKOTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
WAKIL WALIKOTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ANGGOTA DPRD PROP.	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	14	0,01	4	0,00	18	0,02
DOSEN	41	0,04	38	0,03	79	0,07
GURU	605	0,54	975	0,86	1.580	1,40
PILOT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENGACARA	11	0,01	4	0,00	15	0,01
NOTARIS	13	0,01	4	0,00	17	0,02
ARSITEK	11	0,01	1	0,00	12	0,01
AKUNTAN	4	0,00	2	0,00	6	0,01
KONSULTAN	9	0,01	0	0,00	9	0,01
DOKTER	92	0,08	102	0,09	194	0,17
BIDAN	0	0,00	248	0,22	248	0,22
PERAWAT	57	0,05	226	0,20	283	0,25
APOTEKER	8	0,01	21	0,02	29	0,03
PSIKIATER/PSIKOLOG	1	0,00	0	0,00	1	0,00
PENYIAR TELEVISI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PENYIAR RADIO	2	0,00	1	0,00	3	0,00
PELAUT	36	0,03	1	0,00	37	0,03
PENELITI	7	0,01	3	0,00	10	0,01
SOPIR	1.515	1,34	0	0,00	1.515	1,34
PIALANG	2	0,00	3	0,00	5	0,00
PARANORMAL	2	0,00	1	0,00	3	0,00



JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
PEDAGANG	1.455	1,29	3.326	2,95	4.781	4,23
PERANGKAT DESA	237	0,21	88	0,08	325	0,29
KEPALA DESA	14	0,01	0	0,00	14	0,01
BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,00	3	0,00	3	0,00
WIRASWASTA	12.240	10,84	5.461	4,84	17.701	15,67
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	40	0,04	25	0,02	65	0,06
ARTIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ATLIT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CHEFF	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MANAJER	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TENAGA TATA USAHA	0	0,00	1	0,00	1	0,00
OPERATOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TEKNISI	1	0,00	0	0,00	1	0,00
ASISTEN AHLI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEKERJAAN LAINNYA	10	0,01	10	0,01	20	0,02
TOTAL	72.296	64,02	40.637	35,98	112.933	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 41 menunjukkan angkatan kerja yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dari 166.629 total angkatan kerja di Kabupaten Jember tahun 2024 tercatat 112.933 orang sudah bekerja. Sebesar 24,36 persen angkatan kerja Kabupaten Jember didominasi bekerja sebagai Petani/Pekebun, selanjutnya 22,20 persen sebagai Karyawan Swasta dan 15,67 persen sebagai Wiraswasta. Dari tabel di atas juga bisa dilihat bahwa di Kabupaten Jember angkatan kerja laki-laki yang bekerja 64,02 persen yaitu hampir dua kali dari angkatan kerja perempuan yang bekerja sebesar 35,98 persen.

5.3.2 Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi baru mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.



Tabel 42. Jumlah Pencari Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, dan Angka Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENCARI KERJA			JUMLAH ANGKATAN KERJA			ANGKA PENGANGGURAN		
		LK	PR	L + P	LK	PR	L + P	LK	PR	L + P
51.01.01	NEGARA	9.407	7.463	16.870	31.713	17.249	48.962	29,66	43,27	34,46
51.01.02	MENDOYO	6.127	5.187	11.314	21.346	15.891	37.237	28,70	32,64	30,38
51.01.03	PEKUTATAN	2.496	2.148	4.644	9.464	7.305	16.769	26,37	29,40	27,69
51.01.04	MELAYA	6.310	4.879	11.189	19.916	11.937	31.853	31,68	40,87	35,13
51.01.05	JEMBRANA	5.296	4.383	9.679	19.493	12.315	31.808	27,17	35,59	30,43
TOTAL		29.636	24.060	53.696	101.932	64.697	166.629	29,07	37,19	32,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Jika diperhatikan menurut kecamatan, dari tabel 42 menunjukkan bahwa angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Melaya sejumlah 35,13 persen dan Kecamatan Negara yaitu 34,46 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di kecamatan Pekutatan yaitu 27,69 persen. Yang perlu mendapat perhatian serius adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki angkatan pengangguran yang cukup tinggi yaitu Kecamatan Negara, Kecamatan Melaya, dan Kecamatan Jember. Pihak terkait perlu melakukan pelatihan keterampilan tentang ketenagakerjaan dan juga lapangan pekerjaan sehingga jumlah angkatan pengangguran tersebut bisa terserap atau berkurang.

Tabel 43. Distribusi Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Jember Tahun 2024

PENDIDIKAN	JUMLAH PENCARI KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BLM SEKOLAH	14.426	26,87	13.480	25,10	27.906	51,97
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	4.064	7,57	2.873	5,35	6.937	12,92
TAMAT SD/SEDERAJAT	2.070	3,86	1.690	3,15	3.760	7,00
SLTP/SEDERAJAT	2.610	4,86	1.722	3,21	4.332	8,07
SLTA/SEDERAJAT	5.818	10,84	3.675	6,84	9.493	17,68
DIPLOMA I/II	189	0,35	80	0,15	269	0,50
AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	87	0,16	113	0,21	200	0,37
DIPLOMA IV/STRATA I	360	0,67	422	0,79	782	1,46
STRATA-II	9	0,02	4	0,01	13	0,02
STRATA-III	3	0,01	1	0,00	4	0,01
TOTAL	29.636	55,19	24.060	44,81	53.696	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Apabila pencari pekerjaan ini dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, maka dari tabel 43 terlihat bahwa pencari kerja tertinggi adalah dengan status pendidikan Tidak/Belum Sekolah sejumlah 51,97 persen. Kemudian diikuti pencari kerja SLTA/ sederajat



sejumlah 17,68 persen. Secara umum pencari kerja masih berpendidikan rendah. Dengan kualitas pendidikan yang rendah tersebut, perlu adanya perhatian pemerintah Kabupaten Jemberna berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dan perlunya memberikan keterampilan agar mereka mampu bersaing di pasar kerja. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa pencari kerja laki-laki lebih besar secara keseluruhan.

5.4 Sosial

5.4.1 Jumlah Pekerja Anak

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi pekerja anak didasarkan pada jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Tabel 44 berikut menggambarkan jumlah dan persentase pekerja anak di Kabupaten Jemberna tahun 2024.

Tabel 44. Jumlah Penduduk Umur 10-14 Tahun, Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jemberna Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK UMUR 10-14 TAHUN			PEKERJA ANAK			% PEKERJA ANAK
		L	P	L + P	L	P	L + P	
51.01.01	NEGARA	4.487	4.099	8.586	0	0	0	0,00
51.01.02	MENDOYO	2.740	2.509	5.249	0	0	0	0,00
51.01.03	PEKUTATAN	1.181	1.083	2.264	0	0	0	0,00
51.01.04	MELAYA	2.731	2.490	5.221	0	0	0	0,00
51.01.05	JEMBRANA	2.730	2.495	5.225	0	0	0	0,00
TOTAL		13.869	12.676	26.545	0	0	0	0,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberna Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Kabupaten Jemberna pada tahun 2024 tidak ada pekerja anak atau anak yang harus bekerja pada usia sekolah. Kondisi ini perlu terus dipertahankan atau dijaga oleh pemerintah daerah.

5.4.2 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya. Tabel 46 menyajikan Angka Penyandang Cacat Kabupaten Jemberna Tahun 2024.

Tabel 45. Angka Penyandang Cacat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Jemberna Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK PENYANDANG CACAT			JUMAH PENDUDUK	ANGKA PENYANDANG CACAT
	L	P	L + P		
00-04	2	1	3	20.693	0,00
05-09	18	11	29	25.055	0,01



KELOMPOK UMUR	PENDUDUK PENYANDANG CACAT			JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PENYANDANG CACAT
	L	P	L + P		
10-14	79	36	115	26.545	0,03
15-19	76	62	138	25.294	0,04
20-24	49	36	85	26.616	0,03
25-29	40	30	70	24.404	0,02
30-34	33	38	71	22.105	0,02
35-39	32	39	71	21.134	0,02
40-44	43	37	80	23.821	0,02
45-49	35	38	73	23.564	0,02
50-54	54	40	94	24.172	0,03
55-59	52	32	84	20.829	0,03
60-64	35	30	65	16.770	0,02
65-69	19	18	37	11.808	0,01
70-74	14	14	28	8.128	0,01
75+	9	14	23	9.283	0,01
TOTAL	590	476	1.066	330.221	0,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Angka penyandang cacat di Kabupaten Jember pada tahun 2024 sejumlah 0,32 persen. Artinya bahwa sebagian kecil penduduk Kabupaten Jember menyandang cacat. Namun ini harus tetap menjadi perhatian dari Pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.



BAB VI

MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu, mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan. Hal ini erat kaitannya dengan terorisme, konflik sosial, konflik antar suku yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat.

Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bertujuan untuk menetap. Jenis mobilitas permanen atau migrasi antara lain transmigrasi, urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota), dan ruralisasi (perpindahan penduduk dari kota besar ke kota kecil atau desa).

Sedangkan mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tidak menetap dengan durasi tertentu misalnya harian, mingguan atau bulanan.

6.1 Migrasi Keluar (Pindah)

Migrasi penduduk keluar dari Kabupaten Jemberana (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2024 adalah 3.137 orang yang terdiri dari 1.273 laki-laki atau sebesar 40,58 persen dan 1.864 orang perempuan atau sebesar 59,42 persen. Jika diperhatikan menurut kecamatan maka penduduk pindah terbesar ada di Kecamatan Negara (1.060) orang dan Kecamatan Melaya (696) orang. Sedangkan penduduk yang paling sedikit pindah ada di Kecamatan Pekutatan sebesar 320 orang yang terdiri dari 118 orang laki-laki dan 202 orang perempuan. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, penduduk yang pindah lebih banyak perempuan. Salah satu faktornya adalah perkawinan.

Tabel 46. Migrasi Keluar (Pindah) Menurut Kecamatan di Kabupaten Jemberana Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
51.01.01	NEGARA	480	15,30	580	18,49	1.060	33,79
51.01.02	MENDOYO	183	5,83	351	11,19	534	17,02
51.01.03	PEKUTATAN	118	3,76	202	6,44	320	10,20
51.01.04	MELAYA	297	9,47	399	12,72	696	22,19
51.01.05	JEMBRANA	195	6,22	332	10,58	527	16,80
TOTAL		1.273	40,58	1.864	59,42	3.137	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jemberana Tahun 2024



6.2 Migrasi Masuk (Pindah Datang)

Migrasi Masuk atau penduduk yang datang dari luar Kabupaten Jember selama tahun 2024 adalah 2.186 orang, yang terdiri dari 840 laki-laki dan 1.346 perempuan. Jika dilihat dari kecamatan, penduduk yang datang terbesar ada di Kecamatan Negara (764) orang, kemudian disusul oleh Kecamatan Melaya (486) orang, dan Kecamatan Jember (419) orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pekutatan (163) orang.

Jumlah penduduk yang pindah maupun datang lebih besar berjenis kelamin perempuan karena disebabkan faktor pernikahan baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Untuk tahun 2024, jumlah penduduk terbanyak yang pindah dan datang ke Kabupaten Jember juga berasal dari dua kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya.

Tabel 47. Migrasi Masuk (Datang) Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
51.01.01	NEGARA	325	14,87	439	20,08	764	34,95
51.01.02	MENDOYO	110	5,03	244	11,16	354	16,19
51.01.03	PEKUTATAN	55	2,52	108	4,94	163	7,46
51.01.04	MELAYA	184	8,42	302	13,82	486	22,23
51.01.05	JEMBER	166	7,59	253	11,57	419	19,17
TOTAL		840	38,43	1.346	61,57	2.186	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024



BAB VII

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan serta Akta Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemilikinya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dengan akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

7.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh suatu keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan, status pendidikan, golongan darah, dan sebagainya. Tabel 48 menunjukkan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Jember.

Tabel 48. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KK	SUDAH CETAK KK	% CETAK KK	BELUM MEMILIKI KK	% BELUM CETAK KK
51.01.01	NEGARA	31.483	31.436	99,85	47	0,15
51.01.02	MENDOYO	22.076	22.028	99,78	48	0,22
51.01.03	PEKUTATAN	8.530	8.516	99,84	14	0,16
51.01.04	MELAYA	18.691	18.667	99,87	24	0,13
51.01.05	JEMBRANA	20.035	20.005	99,85	30	0,15
TOTAL		100.815	100.652	99,84	163	0,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Dari 100.815 keluarga, sebesar 100.652 keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) atau 99,84 persen. Jumlah keluarga yang belum memiliki atau mencetak Kartu Keluarga sebesar 163



atau 0,16 persen. Jumlah tersebut tergolong sedikit tapi perlu dituntaskan hingga mencapai target 100 persen masyarakat Kabupaten Jember memiliki Kartu Keluarga (KK). Jika dilihat menurut kecamatan, maka persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang paling tinggi ada di Kecamatan Melaya sejumlah 99,87 persen sedangkan kepemilikan KK paling rendah ada di Kecamatan Mendoyo yaitu sejumlah 99,78 persen.

7.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk di Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam buku profil ini disebut sebagai penduduk wajib KTP-el. Dengan memiliki KTP-el, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 49 menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP-el.

Tabel 49. Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP-el			KEPEMILIKAN KTP-el			% KEPEMILIKAN KTP-el		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
51.01.01	NEGARA	36.938	36.489	73.427	36.389	36.067	72.456	29,60	29,03	29,31
51.01.02	MENDOYO	26.674	27.076	53.750	26.319	26.732	53.051	21,41	21,52	21,46
51.01.03	PEKUTATAN	11.772	12.114	23.886	11.581	11.957	23.538	9,42	9,63	9,52
51.01.04	MELAYA	23.846	24.101	47.947	23.477	23.800	47.277	19,10	19,16	19,13
51.01.05	JEMBRANA	23.712	24.443	48.155	23.447	24.157	47.604	19,07	19,45	19,26
TOTAL		122.942	124.223	247.165	121.213	122.713	243.926	98,59	98,78	98,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Dari tabel 49 kedepan perlu dilakukan upaya atau inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman dan kepemilikan KTP-el mencapai 100 persen dibandingkan dengan wajib KTP-el. Selama ini upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el (Jebolan KTP-el) ke sekolah-sekolah dan Desa/Kelurahan maupun kerumah warga yang sakit, cacat, ataupun sudah renta. Disamping usaha yang sudah dilakukan oleh dinas, perlu juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang terus perlu ditingkatkan. Inovasi lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong kesadaran dan kepemilikan dokumen kependudukan adalah adanya inovasi Jember Atma Bhakti (Santunan Kematian). Inovasi tersebut diciptakan guna meningkatkan kepemilikan Akta Kematian dan KTP-el di Kabupaten Jember.



7.3 Kepemilikan Akta Catatan Sipil

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

7.3.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Selain merupakan bukti legal hubungan, Akta Kelahiran juga merupakan bukti legal tentang nama lengkap serta tempat dan tanggal lahir seorang anak. Akta Kelahiran penting untuk dimiliki karena digunakan pada saat mengurus dokumen lainnya seperti paspor atau mendaftar sekolah.

Tabel 50. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan di kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	% KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
51.01.01	NEGARA	100.451	51.687	48.764	51,45
51.01.02	MENDOYO	70.148	34.001	36.147	48,47
51.01.03	PEKUTATAN	31.123	16.359	14.764	52,56
51.01.04	MELAYA	64.330	33.006	31.324	51,31
51.01.05	JEMBRANA	64.169	33.074	31.095	51,54
TOTAL		330.221	168.127	162.094	50,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 50 menggambarkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Jember terhadap total penduduk. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jember masih kecil yaitu 50,91 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember yaitu 330.221. Bila dilihat berdasarkan wilayah, maka kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Pekutatan paling tinggi yaitu 52,56 persen sedangkan di Kecamatan Mendoyo paling rendah yaitu 48,47 persen.

7.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas bagi penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Tabel 51 menyajikan kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember tahun 2024.



Tabel 51. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK STATUS KAWIN			MEMILIKI AKTA KAWIN				BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN	
		L	P	L + P	L	P	L + P	%	TOTAL	%
51.01.01	NEGARA	24.797	24.913	49.710	15.782	15.664	31.446	63.26	18.264	36,74
51.01.02	MENDOYO	18.307	18.372	36.679	9.004	8.870	17.874	48.73	18.805	51,27
51.01.03	PEKUTATAN	8.038	8.198	16.236	4.637	4.614	9.251	56.98	6.985	43,02
51.01.04	MELAYA	16.066	16.213	32.279	9.193	9.129	18.322	56.76	13.957	43,24
51.01.05	JEMBRANA	16.386	16.439	32.825	8.743	8.665	17.408	53.03	15.417	46,97
TOTAL		83.594	84.135	167.729	47.359	46.942	94.301	56.22	73.428	43,78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

Tabel 51 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan Akta Perkawinan. Terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember yang berstatus kawin sebesar 167.729 jiwa. Terdapat 94.301 orang atau 56,22 persen yang memiliki Akta Perkawinan dan 73.428 orang atau 43,78 persen yang belum memiliki Akta Perkawinan. Artinya hampir separuh dari total penduduk berstatus kawin tercatat belum memiliki Akta Perkawinan. Dilihat dari status kepemilikannya, tergolong masih rendah dan perlu mendapat perhatian khusus dari pihak terkait misalnya dengan pelayanan keliling atau jemput bola. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengisian formulir pendataan kependudukan yang tidak lengkap. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya pencatatan perkawinan adalah masih banyak penduduk yang hanya melakukan perkawinan secara agama saja. Tentunya perkawinan jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Jika diperhatikan berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan yang berstatus kawin lebih besar daripada laki-laki akan tetapi kepemilikan Akta Perkawinannya lebih rendah. Penyebabnya kemungkinan adalah banyaknya perempuan yang melakukan perkawinan secara agama saja karena sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya bila dikaitkan dengan wilayah maka persentase tertinggi penduduk berstatus kawin yang memiliki Akta Perkawinan menurut Kecamatan adalah Kecamatan Negara diikuti Kecamatan Pekutatan, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Mendoyo.

7.3.3 Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel 52 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki Akta Perceraian di Kabupaten Jember.



Tabel 52. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Jember Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK STATUS CERAI			MEMILIKI AKTA CERAI				BELUM MEMILIKI AKTA CERAI	
		L	P	L + P	L	P	L + P	%	TOTAL	%
51.01.01	NEGARA	994	1.288	2.282	715	808	1.523	66.74	759	33,26
51.01.02	MENDOYO	616	793	1.409	327	348	675	47.91	734	52,09
51.01.03	PEKUTATAN	193	297	490	133	162	295	60.20	195	39,80
51.01.04	MELAYA	502	681	1.183	316	387	703	59.43	480	40,57
51.01.05	JEMBRANA	564	695	1.259	369	366	735	58.38	524	41,62
TOTAL		2.869	3.754	6.623	1.860	2.071	3.931	59.35	2.692	40,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Tabel 52 menggambarkan jumlah penduduk dan persentase penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Jember. Terlihat bahwa persentase penduduk yang berstatus cerai yang memiliki Akta Perceraian sebesar 59,35 persen dari total 6.623 yang berstatus cerai hidup. Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki Akta Perceraian tertinggi berada pada Kecamatan Negara yaitu 66,74 persen sedangkan yang terendah di Kecamatan Mendoyo yaitu 47,91 persen. Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki Akta Perceraian diduga berasal dari penduduk yang berstatus cerai hidup namun tidak mencatatkan perceraianya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya kepemilikan Akta Perceraian.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, diketahui bahwa penduduk yang berstatus cerai hidup dan yang memiliki Akta Perceraian didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh kebanyakan perempuan belum melakukan perkawinan kembali setelah proses perceraian, begitu pula sebaliknya untuk laki-laki lebih cepat melakukan perkawinan kembali sehingga status cerai hidup lebih sedikit.

7.3.4 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen legal yang menyatakan seseorang telah meninggal dunia. Selama ini masyarakat memandang kurang pentingnya kepemilikan Akta Kematian.

Untuk merangsang dan meningkatkan kepemilikan Akta Kematian dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Jember melalui dinas terkait telah melaksanakan program asuransi dan santunan kematian pemilik KTP-el khusus warga Jember sejak tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2021 inovasi Santunan Kematian diubah namanya menjadi inovasi "Jember Atma Bhakti" yaitu Pemberian penghargaan atas diterbitkannya Akta Kematian tepat waktu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020. Terbukti dari tahun ketahun kepemilikan KTP-el dan Akta Kematian serta Kartu Keluarga semakin meningkat dengan adanya program tersebut.



Tabel 53. Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Jembrana Sampai Tahun 2024

KODE WILAYAH	KECAMATAN	CETAK AKTA KEMATIAN LAKI-LAKI	CETAK AKTA KEMATIAN PEREMPUAN	JUMLAH CETAK AKTA KEMATIAN	KETERANGAN
51.01.01	NEGARA	3.142	2.927	6.069	
51.01.02	MENDOYO	2.604	2.641	5.245	
51.01.03	PEKUTATAN	1.180	1.074	2.254	
51.01.04	MELAYA	2.208	2.055	4.263	
51.01.05	JEMBRANA	2.307	2.199	4.506	
-	null	3.842	3.488	7.330	NOTE: MASUK WILAYAH KAB TETAPI KODE KEC/KEL KOSONG ATAU TIDAK SESUAI SETUP
TOTAL		15.283	14.384	29.667	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Tabel 53 berikut menampilkan kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024. Harapannya dengan adanya inovasi Jembrana Atma Bhakti bagi warga yang ber-KTP-el Kabupaten Jembrana, kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kematian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian penghargaan tersebut akan dibayarkan jika tanggal dilaporkan atau diterbitkannya Akta Kematian tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian yang bersangkutan. Besarnya santunan kematian adalah Rp. 1.500.000 (belum dipotong pajak) per kematian yang akan diterima oleh ahli waris/keluarga yang meninggal.



BAB VIII

KESIMPULAN

Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Jember dapat dilihat dari perkembangan secara kuantitas atau jumlah penduduk maupun secara kualitas atau mutu penduduk. Berdasarkan pendataan dari sumber data secara registrasi, non registrasi, dan dari lintas sektor mengenai perkembangan kependudukan di Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Secara kuantitas atau jumlah penduduk di Kabupaten Jember sesuai DKB Semester 2 Tahun 2024 mencapai 330.221 jiwa yang terdiri dari 165.808 jiwa laki-laki dan 164.413 jiwa perempuan. Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduk Kabupaten Jember terlihat tidak merata di 5 (lima) Kecamatan. Wilayah yang paling besar kepadatan penduduknya berada di Kecamatan Negara sebesar 793 jiwa per Km² dan Kecamatan Jember 684 jiwa per Km². Padahal kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Jember. Penyebabnya adalah kedua wilayah kecamatan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Dilain pihak wilayah terluas berada di Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 34,98 persen dari luas Kabupaten Jember justru kepadatan penduduknya terkecil yaitu sebesar 238 jiwa per Km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Jember tidak seimbang sehingga memerlukan upaya pemerataan pembangunan yang berorientasi desa seperti pembangunan pusat-pusat pelayanan kota antara lain sarana dan prasarana pasar, pendidikan, kesehatan, perbankan, dan lain sebagainya sehingga tidak adanya urbanisasi penduduk atau mobilitas penduduk dari desa ke kota.

Selain masalah kepadatan penduduk, masalah-masalah kependudukan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember adalah rasio ketergantungan yang cukup besar yaitu 44,38 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Jember mempunyai tanggungan sekitar 45 penduduk usia non produktif, 32 orang diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 13 orang lainnya berasal dari kelompok usia tua. Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan bagi usia muda sebesar 31,61 persen dan usia tua sebesar 12,31 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Jember.

Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk Kabupaten Jember merupakan penduduk konstruktif dimana struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur di bawah maupun di atasnya. Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah daerah membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar penduduk produktif tersebut mampu diberdayakan atau tidak menganggur.

Karakteristik penduduk Kabupaten Jember dilihat dari Kepala Keluarga di Kabupaten Jember secara kuantitas paling banyak Kepala Keluarga berjenis kelamin laki-laki sebesar 88.132 atau 87,42 persen dari 100.815 Kepala Keluarga. Status perkawinan terbanyak yaitu berstatus kawin sebesar 82.063 KK atau 81,40 persen. Pendidikan terakhir Kepala Keluarga terbanyak adalah Tamat



SLTA/Sederajat sebesar 37.163 KK atau 36,86 persen dimana hampir sebagian besar bekerja dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 22.655 KK atau 22,47 persen. Ini mencerminkan di Kabupaten Jember masih bersifat daerah agraris, yaitu pengolahan lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang menjadi dominan untuk mata pencaharian kehidupan, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyediakan dan melindungi sarana dan prasarana yang dibutuhkan khususnya di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Jember bila dilihat dalam Bidang Kesehatan tidak terlepas dari kesehatan ibu dan anak/bayi. Untuk data tahun 2024 dapat dilihat dari indikator capaian Angka Kelahiran Kasar (CBR) di Kabupaten Jember mencapai angka 8,79 persen, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan angka 9,5 persen, Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 1,5 persen dan juga Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan di tahun 2024 sebesar 0. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat diketahui Kabupaten Jember dapat dikategorikan berada di tingkat sedang dan untuk angka kematian dapat dikategorikan rendah. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pemenuhan gizi ibu dan anak/bayi, sehingga akan berdampak pada kualitas atau mutu masyarakat Kabupaten Jember secara keseluruhan.

Dalam bidang Pendidikan, di Kabupaten Jember secara umum dapat dikatakan baik namun perlu untuk ditingkatkan. Untuk data tahun 2024, jika dilihat dari APK SD sebesar 89,80 persen, APK SLTP sebesar 87,72 persen, sedangkan jika dilihat dari indikator APM untuk tahun 2024 di jenjang pendidikan SD sebesar 83,02 persen dan di jenjang pendidikan SLTP sebesar 82,49 persen. Hal ini tidak lepas dari pelayanan dibidang pendidikan dengan mensubsidi biaya pendidikan yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun serta beasiswa bagi mahasiswa penduduk Kabupaten Jember yang berprestasi.

Dibidang Ekonomi kualitas penduduk Kabupaten Jember dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Jember mencapai angka 72,86 persen, dari jumlah angkatan kerja Tahun 2024 sebesar 166.629 orang per jumlah penduduk usia kerja (15 tahun sampai 64 tahun) sebesar 228.709 jiwa, hal ini dapat dikategorikan sedang dan perlu ditingkatkan lagi, sehingga dengan angka partisipasi angkatan kerja yang tinggi akan berdampak pada kualitas masyarakat Kabupaten Jember yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan perkapita daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan cukup baik. Dilihat dari angka kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 99,84 persen, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebesar 98,69 persen. Kepemilikan Akta Kelahiran secara keseluruhan adalah 50,91 persen. Untuk kepemilikan Akta Perkawinan yaitu sebesar 56,22 persen dari total status perkawinan. Dan untuk kepemilikan Akta Perceraian baru mencapai 59,35 persen dari keseluruhan status perceraian. Dilihat dari capaian-capaian tersebut maka perlu lagi ditingkatkan dengan memberikan kebijakan atau insentif dalam meningkatkan jumlah kepemilikan akta-akta tersebut, seperti halnya inovasi yang sudah berjalan



yaitu Jembrana Atma Bhakti (santunan kematian) bagi penduduk ber-KTP Kabupaten Jembrana yang meninggal dunia. Dengan demikian masyarakat akan lebih aktif untuk mengurus dokumen kependudukannya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Kematian untuk mendapatkan santunan kematian.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Buku Agregat Semester 2 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.